



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Sistem Pembayaran Efisien, **#UangKita** Kuat

Scan untuk Unduh





“Perekonomian kita hari ini menghadapi tekanan yang berasal dari luar yang sangat berat. Jadi kewaspadaan harus ditingkatkan, baik dari sisi penerimaan perpajakan, bea cukai. Anda yang bertanggung jawab dari belanja negara, pembiayaan hingga kekayaan negara”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati



Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim *Deputies Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan **Desain Grafis dan Layout:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

DAFTAR ISI

Infografis Realisasi APBN s.d. 31 Agustus 2019	6
Ringkasan Eksekutif	7
Perkembangan Makroekonomi	14
Laporan Utama : Nota Keuangan dan RAPBN 2020	17
Laporan Utama : Anggaran Prioritas Tahun 2020	21
Laporan Utama : RAPBN TAHUN 2020 Telah Menampung 3 Kartu Baru sebagai Perwujudan Janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.....	24
Realisasi Pendapatan Pajak.....	27
Realisasi Kepabeanan dan Cukai.....	32
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	34
Laporan Utama : Setor Penerimaan Negara, Semudah Beli Pulsa	39
Laporan Utama : Layanan Bea Cukai Dalam Genggaman.....	44
Laporan Utama : Intergrasi SIMPONI dan MPN G3 untuk Optimalisasi PNBPN	48
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat.....	51
Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	59
Realisasi Pembiayaan Utang	68
Tabel Realisasi APBN s.d. 31 Agustus tahun 2018 dan 2019	70



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp920,15 triliun atau 51,51 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 1,39 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp907,53 triliun.



Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp801,16 triliun atau 50,78 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 0,21 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp119,00 triliun atau 56,98 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 10,10 persen(yoy).



Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp857,73 triliun atau 52,48 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 6,94 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya



PNBP mencatat realisasi sebesar Rp268,16 triliun atau 70,89 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 11,59 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.



TKDD mencapai Rp530,61 triliun atau 64,18 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 5,84 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prospek perlambatan pertumbuhan perekonomian global tahun 2019 memberikan

tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelemahan pertumbuhan mitra dagang utama, penurunan harga komoditas global seiring perlambatan sisi permintaan, dan kekhawatiran di pasar keuangan merupakan risiko yang harus dihadapi oleh ekonomi nasional. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah terus melakukan penguatan fundamental dan stabilitas ekonomi sebagai upaya penguatan landasan pertumbuhan ekonomi ke depan. Tingkat inflasi yang terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah yang tetap terjaga diyakini akan menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Penguatan infrastruktur yang telah dilakukan juga akan mendorong investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi

Hingga akhir Agustus 2019, kinerja realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat sebesar Rp1.189,28 triliun (54,93 persen terhadap target APBN 2019) atau tumbuh sebesar 3,16 persen (yoy). Realisasi tersebut

terdiri atas perpajakan sebesar Rp920,15 triliun, PNBPN sebesar Rp268,16 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp960,5 miliar atau masing-masing telah mencapai 51,51 persen, 70,89 persen, dan 220,65 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Pertumbuhan komponen pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan sebesar 1,39 persen (yoy), PNBPN sebesar 11,59 persen (yoy), sedangkan untuk penerimaan hibah mengalami pertumbuhan negatif 80,90 persen (yoy).

Komponen penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai, masing-masing telah mencapai Rp801,16 triliun atau 50,78 persen dari target APBN 2019 dan Rp119,00 triliun atau 56,98 persen dari target APBN 2019. Realisasi penerimaan pajak tersebut masih mampu tumbuh sebesar 0,21 persen (yoy). Realisasi penerimaan pajak utamanya

ditopang oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pertumbuhannya, penerimaan pajak

didorong oleh pertumbuhan yang cukup signifikan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 95,69 persen (yoy), serta PPh nonmigas yang masih tumbuh positif 3,97 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, PPh nonmigas penerimaannya didukung oleh penerimaan utama pajak yang bersumber dari PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Sementara pertumbuhan PPh nonmigas didorong oleh pertumbuhan dari penerimaan PPh 21 dan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP), yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 10,63 persen (yoy) dan 15,35 persen (yoy).

Secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh beberapa sektor utama seperti Jasa Keuangan dan Transportasi & Pergudangan. Pertumbuhan PPh Pasal 21 menjadi salah satu indikator tingkat utilisasi tenaga kerja yang secara umum masih cukup baik di tahun 2019. Sedangkan, untuk pertumbuhan PPh 25/29 OP, merupakan dampak dari normalisasi pasca *Tax Amnesty*. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM ditopang oleh komponen penerimaan yang berasal dari PPN DN dan PPN Impor. Berdasarkan pertumbuhannya, komponen PPnBM impor merupakan penyumbang pertumbuhan positif sebesar 7,50 persen secara yoy. Sedangkan komponen penerimaan PPN DN, PPnBM DN, dan PPN Impor secara yoy tumbuh negatif masing-masing negatif 6,47 persen, negatif 15,64 persen, dan negatif 6,03 persen. Penurunan pertumbuhan PPN DN dan PPnBM DN sejalan dengan indeks keyakinan konsumen dan *propensity to consume ratio* yang mengalami

penurunan. Lebih lanjut, PPN impor dan PPnBM Impor, secara kumulatif mengalami pertumbuhan negatif akibat tren penurunan nilai impor Indonesia baik migas maupun non migas dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan oleh pelemahan ekonomi global.

Disisi lain, penurunan harga minyak dunia berdampak kepada penurunan penerimaan PPh Migas.

Penurunan harga minyak dunia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengenaan tarif impor baru AS untuk sisa barang dan jasa Tiongkok dan penurunan nilai tukar Tiongkok terhadap Dollar Amerika. Kedua, penurunan perkiraan pertumbuhan perekonomian dunia pada 2019. Ketiga, penurunan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia (Versi *International Energy Agency*).

Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaannya masih tumbuh cukup signifikan sebesar 10,10 persen (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 55,68 persen dari target APBN 2018. **Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh utamanya didorong oleh pertumbuhan komponen penerimaan dari cukai berupa cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai MMEA yang tumbuh masing-masing sebesar 18,60 persen (yoy) dan 17,29 persen (yoy).** Pertumbuhan kepabeanan dan cukai didorong oleh

efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019, adanya kenaikan tarif cukai MMEA serta keberhasilan PCBT dalam mengurangi peredaran Hasil Tembakau dan MMEA ilegal. **Komponen penerimaan bea masuk telah terealisasi sebesar Rp23,83 triliun atau 61,25 persen dari target APBN 2019.** Bea masuk secara kumulatif tumbuh negatif 5,19 persen (yoy). Kondisi tersebut diakibatkan adanya pelemahan kinerja impor di bulan Agustus dibandingkan bulan Juli. Faktor lainnya adalah pengaruh mulai mengecilnya selisih peningkatan kurs (yoy) dan penurunan devisa bayar impor. **Penerimaan komponen bea keluar, realisasi telah mencapai Rp2,05 triliun atau 46,30 persen dari target APBN 2019.** Pertumbuhannya secara kumulatif masih mengalami pertumbuhan negatif 53,25 persen (yoy). Hal ini terjadi karena penurunan ekspor konsentrat tembaga, mengingat penerimaan terbesar bea keluar berasal dari ekspor konsentrat tembaga. Penurunan ekspor konsentrat tembaga terjadi karena perusahaan tambang besar sedang melakukan pembangunan infrastruktur tambang bawah tanah yang menyebabkan penurunan produksi tembaga serta adanya kontrak penjualan tembaga dalam negeri kepada *smelter*.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai Rp268,16 triliun atau mencapai 70,89 persen dari target APBN 2019. Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,59 persen

(yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi Penerimaan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp99,83 triliun atau 52,33 persen dibandingkan target dalam APBN 2019. Penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp107,43 triliun. Hal ini dikarenakan melemahnya harga komoditas sumber daya alam akibat ketidakpastian global. Di sisi lain, penerimaan negara yang bersumber dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan mencapai Rp72,49 triliun atau sebesar 159,00 persen dari target APBN 2019. Peningkatan signifikan ini dikarenakan penerimaan dari bagian Pemerintah atas surplus Bank Indonesia yang tidak ditargetkan dalam APBN 2019. Di sisi penerimaan PNBP Lainnya, sampai dengan bulan Agustus 2019 telah mencapai Rp67,68 triliun atau sebesar 71,95 persen dari target APBN 2019. Pendapatan BLU hingga Agustus 2019 telah mencapai Rp28,16 triliun atau 58,80 persen dari target APBN 2019. Meskipun capaian PNBP cukup positif, Pemerintah senantiasa mewaspadai perkembangan harga komoditas maupun nilai tukar yang cukup berpengaruh terhadap kinerja PNBP.

Realisasi Belanja Negara sampai akhir Agustus 2019 mencapai Rp1.388,33 triliun (56,4 persen dari pagu APBN), meningkat 6,5 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp857,73 triliun (52,5 persen dari

pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp530,61 triliun (64,2 persen dari pagu APBN). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Agustus 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen (yoy), utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp78,66 triliun (77,1 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 34,5 persen (yoy). Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Agustus 2019 mencapai Rp103,46 triliun atau 46,12 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp75,42 triliun (47,14 persen dari APBN 2019) dan subsidi nonenergi Rp28,03 triliun (43,56 persen dari APBN 2019). Untuk subsidi energi, realisasi tersebut telah memperhitungkan pembayaran atas volume BBM dan LPG tabung 3 kg serta penjualan listrik yang disalurkan dari Januari hingga Juli 2019. Realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp44,52 triliun, atau 44,24 persen dari pagu APBN, dengan realisasi volume 62,03 persen dari quota untuk jenis BBM solar dan 56,43 persen quota untuk LPG tabung 3 kg. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik mencapai Rp30,89 triliun atau 52,08 persen dari pagu APBN. Secara umum, persentase realisasi subsidi energi

terhadap pagu anggaran 2019 dapat dikatakan lebih rendah dari target. Hal ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi ICP (rata-rata USD 62,18/barel) dibandingkan dengan asumsi dalam APBN (USD 70,/barel. Selain itu, dipengaruhi juga oleh terjadinya apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar selama periode Januari-Agustus yang mencapai Rp14.182/dolar Amerika, dibandingkn dengan asumsi dalam APBN Rp15.000/dollar Amerika. Hal serupa juga terjadi pada realisasi subsidi nonenergi. Rendahnya persentase realisasi terhadap pagu anggaran subsidi nonenergi utamanya terjadi pada public service obligation (PSO) dengan realisasi sebesar Rp1,63 triliun (24,1 persen dari APBN 2019) dan subsidi kredit program dengan realisasi sebesar Rp4,85 triliun (29,2 persen dari APBN 2019). Rendahnya persentase realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh lambatnya penagihan dan proses verifikasi yang menjadi dasar pembayaran subsidi

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp530,61 triliun atau 64,18 persen dari pagu APBN 2019,

yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp488,41 triliun (64,54 persen) dan Dana Desa Rp42,20 triliun (59,80 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp474,62 triliun (65,50 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp6,53 triliun (65,28 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp7,25 triliun (32,71 persen). Realisasi TKD sampai dengan Agustus 2019 tersebut lebih tinggi Rp23,33 triliun atau sekitar 5,02

persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Agustus 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) penyaluran DBH yang lebih tinggi 37,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh penyaluran kurang bayar DBH kepada daerah penerima berdasarkan PMK nomor: 77/PMK.07/2019; (2) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 21,68 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya peningkatan penyaluran DID kepada sebagian besar Pemerintah Daerah termasuk Pemda pada daerah yang terdampak bencana alam di Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah serta adanya pemahaman Pemda yang semakin baik terhadap peraturan terkait DID; serta (3) realisasi Dana Keistimewaan DIY yang meningkat sebesar 20,00 persen yang diakibatkan karena

tingginya penyaluran sampai dengan bulan Agustus 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Agustus 2019 lebih tinggi 5,96 triliun (16,43 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh penyelesaian penyaluran Dana Desa pada tahap I dan II serta adanya koordinasi dan sosialisasi secara intensif kepada Pemerintah Desa yang telah dilakukan selama ini.

Realisasi defisit APBN hingga akhir Agustus 2019 mencapai 199,06 triliun atau sekitar 1,24 persen PDB.

Sementara itu, posisi keseimbangan primer sampai dengan akhir Agustus 2019 berada pada posisi negatif Rp26,64 triliun. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Agustus 2019 mencapai Rp280,32 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar

Realisasi APBN sampai dengan Agustus 2019

Realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2019 mencatatkan pendapatan negara mampu tumbuh 3,16 persen (yoy), mencapai Rp1.189,28 triliun atau 54,93 persen dari target APBN tahun 2019. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.388,33 triliun atau 56,41 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 6,52 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

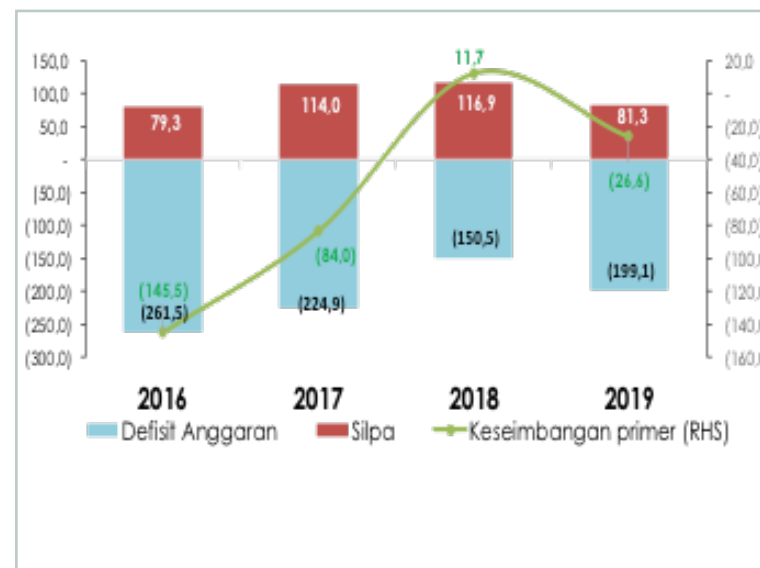
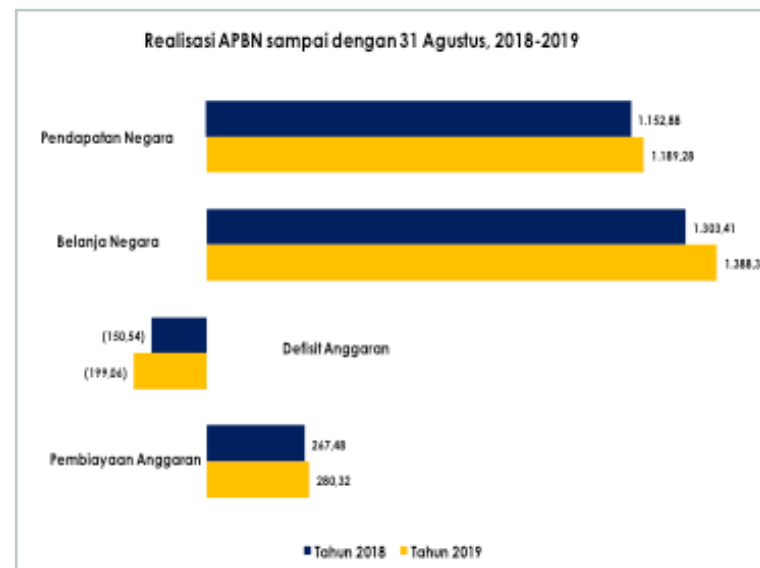
Adapun rincian dari realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2019 tersebut meliputi:

- a. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp920,15 triliun atau 51,51 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 1,39 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp907,53 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp801,16 triliun atau 50,78 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 0,21 persen (yoy).
 - Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp119,00 triliun atau 56,98 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 10,10 persen(yoy).
- b. PNBPN mencatat realisasi sebesar Rp268,16 triliun atau

70,89 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 11,59 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

- c. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp857,73 triliun atau 52,48 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 6,94 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
- d. TKDD mencapai Rp530,61 triliun atau 64,18 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 5,84 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan capaian realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai Rp199,06 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer mencapai negatif Rp26,64 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 31 Agustus 2019 sebesar Rp280,32 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp5,13 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp81,26 triliun. Realisasi APBN sampai dengan 31 Juli 2019, pendapatan negara mampu tumbuh 5,85 persen dan belanja negara meningkat 7,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta defisit anggaran mencapai 1,14 persen terhadap PDB.



Perkembangan Ekonomi Makro

World Economic Outlook International Monetary Fund (WEO IMF) bulan Juli 2019 memperkirakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global mengalami koreksi kebawah.

Hal ini seiring dengan masih tingginya risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perekonomian global bersumber dari kelanjutan perang dagang dan isu geopolitik. Namun, adanya kesepakatan untuk melakukan pembahasan antara Amerika Serikat Tiongkok diharapkan akan mengurangi eskalasi perang dagang. Prospek ekonomi global tersebut berimbang secara langsung terhadap penurunan harga komoditas global, terutama minyak dan batubara. Dalam merespon prospek ekonomi global tersebut, Pemerintah akan terus berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara sektoral, sektor industri manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa perlu untuk diperkuat sehingga mampu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan harga di tingkat

konsumen pada Agustus 2019 menggambarkan terjadinya inflasi yang didorong terutama oleh peningkatan harga cabai, emas, dan biaya pendidikan. Inflasi Agustus 2019 tercatat sebesar 0,12 persen (mtm) atau 2,48 persen (ytd) atau 3,49 persen (yoy). Kelompok bahan makanan secara kumulatif menyumbang deflasi, namun inflasi aneka cabai masih menjadi sumber utama tekanan inflasi. Musim kemarau yang lebih panjang dan kering berdampak pada turunnya produksi aneka cabai, terutama cabai merah dan rawit yang memiliki karakteristik daya tahan terhadap cuaca yang relatif lemah. Kondisi ini menyebabkan pasokan yang menurun sehingga kenaikan harga terjadi secara terus-menerus sejak bulan April. Sementara itu, tarif angkutan udara kembali mengalami penurunan sehingga mendorong kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi. Berlakunya kebijakan penurunan tarif sejak bulan Juli untuk kelas *low cost carrier* (LCC) pada hari dan jam tertentu kembali mempengaruhi terjadinya deflasi tarif angkutan udara di 47 kota. Selain itu, masuknya periode *low*

season juga mendorong penurunan tarif angkutan udara lebih dalam. Beberapa komoditas pada kelompok pengeluaran lainnya memberikan sumbangan inflasi. Seiring dengan masuknya tahun ajaran/akademik baru, kelompok pendidikan mengalami inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA (terutama sekolah swasta), dan akademi atau perguruan tinggi. Selain itu, tren peningkatan harga emas global juga mendorong naiknya harga emas perhiasan domestik sehingga menyebabkan inflasi pada kelompok sandang. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga saat ini (2,48 persen (ytd)), masih terdapat ruang gerak sebesar 1,02 persen untuk menjaga inflasi akhir tahun sesuai target 3,5 persen.

Tren nilai tukar Rupiah terus berada pada posisi yang stabil dan cenderung menguat seiring dengan tetap terjaganya aliran modal ke dalam negeri dan pelonggaran likuiditas global. Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 10 September 2019 tercatat pada level Rp14.031 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Rupiah mengalami

apresiasi sebesar 3,0 persen (ytd) dibandingkan awal tahun 2019. Dari sisi eksternal, pelonggaran likuiditas global karena pelonggaran kebijakan moneter negara maju yang mengakibatkan aliran modal ke *emerging market*, termasuk Indonesia memberikan pengaruh terhadap penguatan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, prospek positif ekonomi nasional yang tetap terjaga, termasuk peningkatan *sovereign rating* Indonesia, juga memberikan pengaruh terhadap penguatan nilai tukar. Hingga akhir Agustus 2019, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang cukup tinggi, yakni sebesar USD126,4 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir Juli 2019 sebesar USD125,9 miliar. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Dalam merespon prospek pertumbuhan ekonomi saat ini dan untuk menopang pertumbuhan ekonomi kedepan, Pemerintah konsisten untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Penguatan industri manufaktur nasional diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk itu Pemerintah berupaya memperkuat industri manufaktur nasional melalui (i) efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, (ii) perbaikan iklim investasi, (iii) harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, (iv) mendukung kelancaran sistem pembayaran, (v) mendorong pembiayaan, dan (vi) mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur.



Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2020

Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya yaitu periode transisi dalam memperkokoh daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun 2036- 2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.

Melalui APBN Tahun 2020, Pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Momentum positif kinerja perekonomian dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi modal positif untuk melanjutkan tren peningkatan kinerja perekonomian nasional ke depan. Namun demikian, beberapa faktor eksternal seperti peningkatan tensi perang dagang, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta faktor geopolitik yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian domestik tetap perlu terus diantisipasi.

Pemerintah juga bertekad memberikan manfaat perekonomian Indonesia sebesar-besarnya kepada masyarakat secara lebih merata antara lain ditunjukkan pada perbaikan target indikator kesejahteraan rakyat sekaligus mencerminkan upaya Pemerintah

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2020, pemerintah optimis tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi sekitar 8,5 persen - 9,0 persen dan tingkat pengangguran menjadi 4,8 persen - 5,1 persen. Sementara itu, ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Rasio Gini akan ditekan menjadi 0,375 - 0,380 dan Indeks Pembangunan Manusia akan ditingkatkan menjadi 72,51. Upaya pencapaian target tersebut akan didukung oleh berbagai kebijakan fiskal di dalam RAPBN tahun 2020.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020, kebijakan RAPBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam bentuk program-program prioritas pembangunan, yaitu (1) penguatan daya saing sumber daya manusia, yang ditujukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani; (2) penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi; (3) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; (4) penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan (5) reformasi birokrasi.

Upaya peningkatan kualitas belanja negara tercermin dalam alokasi belanja negara tahun 2020. Alokasi belanja pemerintah pusat akan

dimanfaatkan terutama untuk bidang prioritas pembangunan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, bidang infrastruktur, dan bidang prioritas lainnya. Untuk bidang pendidikan, upaya pemerintah dilakukan terutama pada inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan skill SDM dengan melanjutkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), memberikan KIP Kuliah yang merupakan kelanjutan dari KIP SMA/ sederajat. Sementara itu, untuk menjawab tantangan di era industri 4.0, dan mengatasi rendahnya produktivitas pekerja, Pemerintah meluncurkan Kartu Pra Kerja untuk peningkatan skill dalam rangka mengakselerasi penyerapan tenaga kerja muda melalui penguatan skilling dan reskilling sebanyak 2 juta penerima manfaat.

Inisiatif pemerintah di bidang kesehatan akan dilakukan terutama melalui penguatan program promotif dan preventif bidang kesehatan, serta percepatan penanganan stunting melalui penguatan program konvergensi perluasan fokus intervensi dari 160 kabupaten/ kota menjadi 260 kabupaten/kota. Sementara itu, keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional akan terus dijaga dan dikendalikan sesuai tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan peningkatan ketepatan sasaran menggunakan single data dan pemanfaatan Information, Communication and Technology (ICT) merupakan arah strategi di bidang perlindungan sosial untuk mendukung

beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan dan kartu sembako, yang merupakan penyempurnaan dari program bantuan pangan.

Konsistensi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ditunjukkan dengan tetap memprioritaskan pembangunan bidang infrastruktur. Dukungan percepatan infrastruktur juga dilaksanakan melalui partisipasi swasta, BUMN maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan fasilitas penyiapan proyek (project development fund/ PDF) dan memberikan dukungan kelayakan proyek (Viability Gap Fund/ VGF) untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Prioritas pembangunan juga mencakup penguatan destinasi pariwisata, penguatan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta penguatan penelitian. Selain itu, upaya penguatan kualitas belanja juga dilakukan melalui kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, antara lain program penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani.

Upaya penajaman belanja negara juga didukung melalui penguatan peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan difokuskan untuk peningkatan daya saing melalui

percepatan penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM. Peningkatan daya saing daerah juga diupayakan antara lain melalui memperkuat dana transfer umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, mengarahkan pengelolaan dana transfer khusus (DTK) dalam mendukung implementasi desentralisasi dan menjaga ketercapaian output, memperkuat pengelolaan dana desa, diharapkan dengan kombinasi kebijakan tersebut dapat mendukung inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi, serta peningkatan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Untuk memenuhi alokasi pendanaan atas program-program pembangunan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara untuk mendorong investasi dan daya saing. Kebijakan penerimaan perpajakan diarahkan terutama untuk pembenahan tax base melalui implementasi pertukaran data informasi perpajakan secara otomatis/ Automatic Exchange of Information (AEOI). Selanjutnya Pemerintah juga menyadari perubahan proses bisnis di pasar domestik dan global serta dampak kemajuan teknologi informasi, sehingga Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang sepadan bagi semua pelaku usaha (level playing field).

Berbagai kombinasi insentif/belanja perpajakan (tax expenditure) pada

Anggaran Prioritas Tahun 2020

sektor perpajakan diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Pemberian insentif super deduction (pengurangan pajak PPh Badan) sebagai bentuk dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan vokasi dan penelitian dan pengembangan, serta insentif investment allowance (fasilitas pajak dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak) sebagai bentuk dukungan bagi industri padat karya. Sedangkan implementasi regulasi pengurangan PPh (tax holiday) diberlakukan untuk menumbuhkan investasi domestik. Selain itu, kebijakan kepabeanan dan cukai berperan dalam mendukung percepatan pelayanan prosedural ekspor dan impor, sehingga mendorong kemudahan berbisnis dan menurunkan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time).

Sementara itu, reformasi di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dilakukan pasca penetapan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui berbagai upaya penyempurnaan regulasi, pengaturan tarif yang adil dan fleksibel, penguatan pengawasan dan pemeriksaan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi di sektor alam (SDA), serta peningkatan pelayanan dan kualitas layanan publik.

Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan

ini ditujukan untuk memelihara momentum perekonomian yang semakin tumbuh dan menghindari opportunity loss dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBN.

Sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah, pembiayaan utang masih diperlukan dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Strategi pembiayaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman serta menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, dan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dengan memperhatikan value for money. Untuk mendukung program prioritas, pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong peningkatan ekspor nasional melalui program National Interest Account (NIA), meningkatkan daya saing usaha melalui kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ultra mikro (UMi), serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui Dana Pengembangan Pendidikan, Dana Abadi Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi, Dana Abadi Kebudayaan, serta Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Di tahun pertama periode kedua kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI: Prof. Dr K.H. Ma'ruf Amin, Pemerintah merumuskan tema kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, Pemerintah memformulasikan lima program prioritas dalam RAPBN tahun 2020. Prioritas Pertama, kualitas sumber daya manusia yang kompatibel terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu, sektor pendidikan dan kesehatan akan terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani. Terkait dengan anggaran pendidikan, dalam RAPBN tahun 2020 besarnya direncanakan mencapai Rp505.754,9 miliar atau 20 persen dari belanja negara, yang terdiri atas:

1. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp169.897,3 miliar, yang antara lain digunakan untuk

pemberian beasiswa melalui KIP kepada 20,1 juta siswa, KIP Kuliah kepada 818 ribu mahasiswa, peningkatan keterampilan bagi pencari kerja melalui Kartu Pra Kerja kepada 2 juta peserta.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp306.857,6 miliar, yang antara lain digunakan untuk DAK Fisik Pendidikan dan DAK Nonfisik berupa BOS, TPG PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD.
3. Investasi Pemerintah pada pos pembiayaan Rp29.000,0 miliar, yang diantaranya digunakan untuk memperkuat peran LPDP sebagai SWF Rp18.000,0 miliar dan dana abadi penelitian Rp5.000,0 miliar.

Sementara itu, terkait dengan anggaran kesehatan, dalam RAPBN tahun 2020 besarnya direncanakan mencapai Rp132.179,5 miliar atau 5,2 persen terhadap RAPBN tahun 2020, yang dimanfaatkan untuk mendukung dan mendorong tercapainya sasaran/ indikator kesehatan sesuai RKP pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut: (1) persentase prevalensi

stunting pada balita menjadi 27,1 persen, (2) jumlah penerima PBI JKN dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah sebesar 96,8 juta jiwa, dan (3) persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas sebesar 30 persen.

Prioritas kedua, perlindungan sosial yang komprehensif. Sebagai wujud nyata kehadiran Negara dalam mengurus masyarakatnya, Pemerintah senantiasa berupaya melindungi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, dari risiko sosial dan ekonomi. Pemerintah berupaya agar perlindungan sosial mampu menjangkau setiap warga negara Indonesia pada setiap fase kehidupan, sejak dalam fase embrio sampai dengan kematian. Dalam RAPBN 2020, anggaran perlindungan sosial direncanakan Rp385.319,6 miliar, yang antara lain untuk (1) program PKH bagi 10,0 juta KPM, (2) pengembangan BPNT menjadi Kartu Sembako dengan sasaran 15,6 juta KPM, serta (3) program subsidi yang diantaranya mencakup subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi bunga kredit program.

Prioritas ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi industrialisasi. Pemerintah menyadari bahwa untuk pembangunan infrastruktur diperlukan pendanaan yang cukup besar, sementara itu kapasitas fiskal yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai, sehingga diperlukan innovative dan creative financing dengan pelibatan

peran swasta, BUMN, BLU dan Pemda, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan portofolio pembiayaan yang berisiko rendah. Dalam RAPBN 2020 anggaran infrastruktur diperkirakan mencapai Rp419.240,6 miliar, yang akan digunakan untuk: (1) di bidang konektivitas, antara lain untuk pembangunan jalan 837 km, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km'sp, dan penyelesaian 3 bandara baru, (2) di bidang ketahanan air, antara lain diarahkan untuk rehabilitasi dan pembangunan 16 ribu ha jaringan irigasi dan pembangunan 49 unit bendungan, (3) di bidang perumahan, diarahkan antara lain untuk pembangunan sebanyak 5.224 unit rusun dan 2.000 unit rumah khusus, serta (4) kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas baru di tahun 2020, antara lain KSPN Super Prioritas (termasuk GP Mandalika), dan persiapan pelaksanaan PON 2020.

Prioritas keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong pusat pertumbuhan di daerah. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah berlangsung kurang lebih dua dasawarsa lamanya. Dari sisi anggaran, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan porsi anggaran dalam APBN yang dialihkan kepada daerah. Dari sisi kebijakan, desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendukung pendanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Penguatan kualitas belanja daerah sangat krusial dalam menciptakan belanja daerah yang lebih produktif dan berdaya guna untuk menggerakkan sektor riil di daerah. Dalam RAPBN 2020, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp858.790,0 miliar, yang antara lain untuk anggaran pendidikan sebesar Rp306.857,6 miliar, anggaran kesehatan sebesar Rp34.930,3 miliar, dan anggaran infrastruktur sebesar Rp199.933,1. Target output TKDD tersebut diantaranya mencakup: (1) dari pengalokasian anggaran pendidikan antara lain digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sebanyak 31.812 ruang; (2) dari pengalokasian anggaran kesehatan antara lain digunakan untuk melanjutkan program BOS Reguler kepada 45,7 juta siswa, guru PNSD yang bersertifikasi dan

menerima Dana TPG PNSD sebanyak 1.153 ribu guru, penguatan pelayanan kesehatan dasar 9.653 puskesmas, dan penguatan intervensi stunting di 260 kabupaten/kota.

Prioritas kelima, reformasi birokrasi. Pemantapan reformasi birokrasi akan terus diupayakan untuk mendorong produktivitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan menciptakan birokrasi yang efisien, melayani, kompeten, berintegritas, serta profesional. Guna mendukung kebijakan tersebut, dalam RAPBN 2020 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk reformasi birokrasi sebesar Rp261.295,2 miliar, yang diantaranya digunakan untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang antara lain terkait dengan penataan kelembagaan, pengelolaan kinerja, serta perumusan kebijakan hingga pengendalian/pengawasan reformasi

RAPBN TAHUN 2020: Telah Menampung 3 Kartu Baru Sebagai Perwujudan Janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

Dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin ke jenjang yang lebih tinggi, pada tahun 2020 Pemerintah akan menyediakan KIP Kuliah. Penyediaan KIP Kuliah ini pada dasarnya merupakan perluasan dari cakupan penerima bantuan beasiswa bidikmisi. Jumlah sasaran penerima KIP Kuliah pada RAPBN 2020 ditargetkan sebanyak 818 ribu mahasiswa yang terdiri dari penerimaan mahasiswa baru sebanyak 420 ribu mahasiswa dan lanjutan beasiswa bidikmisi on going sebanyak 398 ribu mahasiswa. Alokasi anggaran untuk KIP Kuliah dalam RAPBN 2020 sebesar Rp7.501,5 miliar melalui Kemenristekdikti dan Kemenag.

Kriteria penerima KIP Kuliah (1) lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/ MA/ sederajat yang berprestasi akademik, (2) pemegang KIP selama di SMA/ SMK/MA dan/atau termasuk dalam 40 persen pendapatan terbawah, (3) diterima di PTN/PTS/prodi yang terakreditasi A dan B. Untuk mendukung kesesuaian pendidikan dan kebutuhan industri, bidang studi

penerima KIP Kuliah diutamakan pada pendidikan vokasi atau politeknik serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi. Hal ini diharapkan mendukung pengurangan pengangguran.

Kartu Pra Kerja

Dalam rangka peningkatan kualitas keterampilan dan produktivitas para pencari kerja baru (khususnya anak muda), maupun yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK), pada tahun 2020, Pemerintah akan menyediakan Kartu Pra Kerja. Selain disiapkan untuk menghilangkan gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja, kebijakan pemberian Kartu Pra Kerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital. Melalui program Kartu Pra Kerja diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja, sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

Pada tahun 2020, Kartu Pra Kerja akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang. Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu pemberian pelatihan melalui tatap muka dan sertifikasi kompetensi kerja kepada pencari kerja melalui LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan Training Center Industri. Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja baru (skilling) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (re-skilling).
2. Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling). Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target. Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis,

tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital.

Dalam RAPBN Tahun 2020, alokasi anggaran kartu pra kerja direncanakan sebesar Rp10.000,0 miliar.

Kartu Sembako

Dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka BPNT akan dikembangkan menjadi Kartu Sembako dengan sasaran tetap 15,6 juta KPM. Dengan Kartu Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, Kartu Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti saat ini. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Kartu Sembako melalui instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Untuk menjalankan program Kartu Sembako, dalam RAPBN tahun 2020 Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp28.080,0 miliar.



Foto Ilustrasi
Media Keuangan

PENDAPATAN PAJAK

Akhir Agustus, Penerimaan Pajak Tembus
Angka Rp800 Triliun

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s.d. Agustus 2019	Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - Agustus 2019		
			Δ% 2018 - 2019	% thd Target	
	Pajak Penghasilan	894,45	494,21	3,08 %	55,25 %
	- Migas	828,29	454,78	3,97 %	54,91 %
	- Non Migas	66,15	39,42	-6,22 %	59,59 %
	PPN & PPnBM	655,39	288,01	-6,36 %	43,95 %
	PBB & Pajak Lainnya	27,71	18,94	52,41 %	68,34 %
	Jumlah	1.577,56	801,16	0,21 %	50,78 %

*angka sementara per Agustus 2019

Berdasarkan pembukuan yang tercatat di Kas Negara, capaian penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 telah menembus angka Rp800 triliun, tepatnya Rp801,16 triliun. Posisi penerimaan pajak saat ini telah mencapai 50,78 persen dari target APBN 2019 yang ditargetkan sebesar Rp1.577,56 triliun. Dan apabila kita bandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun lalu (Januari - Agustus 2018), penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar

0,21 persen (yoy). Pajak Penghasilan, terutama PPh Nonmigas, masih menjadi sumber utama penerimaan pajak, dengan kontribusi Rp454,78 triliun, atau sekitar 57 persen dari total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan mencapai 3,97 persen (yoy).

PPh 21, PPh OP dan PPh UMKM Top Performer

Bila kita gali lebih dalam dapat kita lihat bahwa kinerja PPh Nonmigas

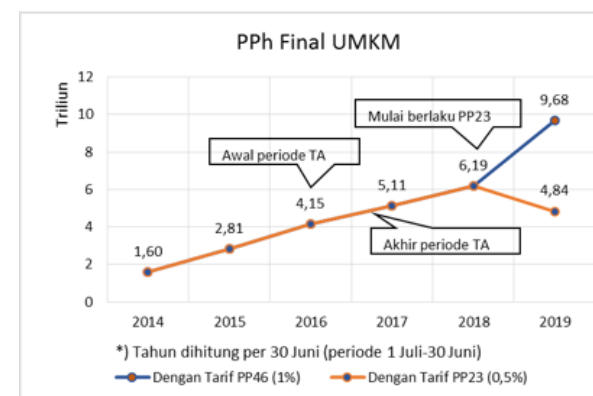
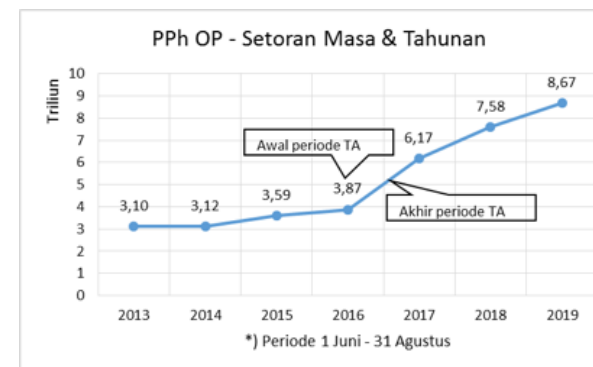
Jenis Pajak	Realisasi $\Delta\%$	
	Jan-Agustus 2019	Jan-Agustus 2018-2019
PPh Pasal 21	102,13	10,63 %
PPh Pasal 22	11,39	6,61 %
PPh Pasal 25/29	164,54	1,34 %
- Badan	8,91	15,35 %
- Orang Pribadi	155,62	0,64 %
PPh Final	76,05	6,14 %
PPN Dalam Negeri	167,63	-6,47 %
Pajak atas Impor	150,89	-4,26 %
- PPh 22 Impor	36,60	0,56 %
- PPN Impor	111,22	-6,03 %
- PPnBM Impor	3,08	7,50 %

**Pertumbuhan
Penerimaan
Pajak**

ditopang oleh jenis pajak PPh Pasal 21, yang tumbuh double digits hingga 10,63 persen (yoy). PPh Pasal 21 merupakan pajak potongan/pungutan atas gaji/honorarium yang diterima oleh pekerja/karyawan, oleh karena itu stabilnya kondisi ketenagakerjaan seperti kenaikan tingkat upah dan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dibarengi rendahnya tingkat pengangguran menjadi faktor utama pendorong penerimaan PPh Pasal 21.

Berdasarkan data BPS (Berita Resmi Statistik 6/5/2019), rata-rata Upah/ Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/

Karyawan/Pegawai secara Nasional per Februari 2019 sebesar Rp2,79 juta, naik dari Rp2,65 juta per Februari 2018. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018, terdiri atas 129,36 juta orang penduduk bekerja dan 6,82 juta orang menganggur. Jumlah penduduk bekerja bertambah 2,29 juta orang sedangkan pengangguran berkurang 50 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2019 sebesar 5,01 persen, turun dibandingkan Agustus 2018 (5,34 persen) dan Februari 2018 (5,13

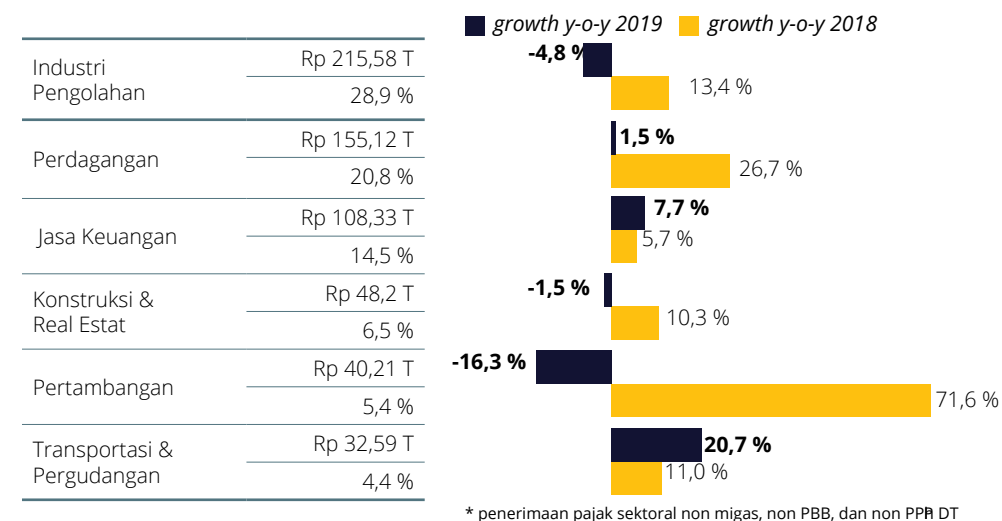


Catatan: PPh Final UMKM dihitung dengan periode 1 Juli - 30 Juni menyesuaikan masa berlaku PP46/2013 (1 Juli 2013) dan PP23/2018 (1 Juli 2018).

persen). Sedangkan khusus untuk sektor Pemerintah, realisasi belanja pegawai dalam APBN untuk periode Januari-Agustus 2019 mengalami pertumbuhan 11,64 persen (yoy).

Sementara itu, jenis pajak PPh Nonmigas dengan performa terbaik adalah PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang mampu tumbuh double digits hingga 15,35 persen. Sepanjang 2019 ini pertumbuhan PPh dari Wajib Pajak Orang Pribadi cukup stabil. Senada dengan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, kinerja PPh Final UMKM (PP46 /2013 - PP23/2018)

juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Untuk periode Januari - Agustus 2019, meskipun mengalami penurunan tarif sebesar 50 persen dari 1 persen menjadi 0,5 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, PPh Final UMKM hanya menunjukkan penurunan 23,67 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2018. Oleh sebab itu, bila kita lihat kinerja sebelum dan sesudah perubahan tarif, yakni periode Juli 2018 - Juni 2019, sesungguhnya PPh Final UMKM mengalami pertumbuhan hingga 56,50 persen (yoy) bila tarif lama masih berlaku, sebagaimana periode Juli 2017 - Juni 2018. Kinerja apik PPh Pasal 25/29 OP dan



Penerimaan Pajak Sektoral

PPh Final UMKM tidak lepas dari efek perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan kesadaran perpajakan di tengah masyarakat, yang diperkuat juga oleh momentum pasca Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).

Dampak Faktor Eksternal

Pertumbuhan pajak-pajak atas impor sangat erat hubungannya dengan kinerja impor secara nasional. Secara kumulatif untuk periode Januari - Juli 2019 terjadi penurunan nilai impor nasional sebesar 9,00 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terefleksikan pada kinerja PPN Impor yang juga menunjukkan penurunan 6,03 persen (yoy). Efek penurunan impor sedikit

lebih moderat terhadap jenis pajak PPh Pasal 22 Impor yang masih tumbuh 0,56 persen (yoy), salah satunya diakibatkan penerapan kenaikan tarif yang mulai berlaku pada bulan September 2018. Sementara itu, geliat impor produk otomotif di tengah tekanan industri otomotif domestik mampu mendorong jenis pajak PPhBM Impor tumbuh 7,50 persen (yoy).

Faktor eksternal juga berdampak besar pada kinerja PPh Migas, yang mengalami penurunan 6,22 persen (yoy). Penurunan ini sejalan dengan penurunan harga dan lifting migas. Harga ICP pada bulan Agustus 2019 adalah 57,27 USD/Barrel, turun bila dibandingkan bulan Juli 2019

sebesar 61,32 USD/Barrel, dan bila dibandingkan Agustus 2018 sebesar 69,36 USD/Barrel. Lifting minyak bumi sampai dengan Triwulan II 2019 rata-rata sebesar 752.000 barel per hari sedangkan gas bumi sebesar 1.037.000 barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan 771.000 barel per hari dan 1.152.000 BOEPD pada periode yang sama tahun 2018.

Pajak Lainnya dan Kinerja Per Sektor

PPh Pasal 22 dan PPh Final menunjukkan pertumbuhan yang cukup sehat, masing-masing tumbuh 6,61 persen (yoy) dan 6,14 persen (yoy), atau masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Triwulan II (5,05 persen). Di sisi lain, beberapa jenis pajak seperti PPh 25/29 Badan dan PPN Dalam Negeri masih mengalami tekanan diakibatkan naiknya jumlah restitusi, tumbuh masing-masing 0,64 persen (yoy) dan negatif 6,47 persen (yoy). Khusus untuk pertumbuhan PBB yang mencapai 52,41 persen (yoy), secara

umum hal ini disebabkan pergeseran waktu pembayaran PBB Migas yang tahun ini dibayarkan lebih awal, dari sebelumnya pada bulan Oktober dan November di tahun 2018 menjadi bulan Juni di tahun 2019

Dari sisi sektoral, beberapa sektor utama penyumbang penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang menggembirakan, terutama sektor Transportasi & Pergudangan yang tumbuh double digits hingga 20,7 persen (yoy) serta sektor Jasa Keuangan & Asuransi yang tumbuh 7,7 persen (yoy). Namun demikian, tekanan restitusi dan imbas moderasi aktivitas impor terutama dirasakan oleh sektor Industri Pengolahan (tumbuh negatif 4,8 persen (yoy)) dan sektor Perdagangan (tumbuh 1,5 persen (yoy)). Sementara itu faktor eksternal berupa tren perlambatan harga komoditas di pasar dunia memberikan tekanan pada sektor Pertambangan (tumbuh negatif 16,3 persen (yoy)).

KEPABEANAN DAN CUKAI

Kinerja Penerimaan Bea Cukai Tumbuh Positif di Bulan Agustus 2019

No.	Jenis Penerimaan	APBN 2019	Realisasi s.d. Julul 2019		Pertumbuhan (yoy)		% Capaian
			2018	2019	%2018	%2019	
1	BEA MASUK	38.90	25.13	23.83	14.47	-5.19	61.25
2	CUKAI	165.50	78.57	93.12	58.93	18.52	56.27
3	BEA KELUAR	4.42	4.38	2.05	94.27	-53.25	46.30
TOTAL		208.82	108.08	119.00	46.76	10.10	56.98
PPN Impor			118.35	111.22	27.43	-6.03	
PPn BM Impor			2.86	3.08	2.47	7.50	
PPH Pasal 22 Impor			36.39	36.60	25.62	0.56	
Total PDRI lainnya			157.61	150.89	26.45	-4.26	
Total Bea Cukai dan Pajak			265.69	269.89	33.99	1.58	

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp119 triliun. Capaian tersebut merupakan 56,98 persen dari target dan tumbuh positif sebesar 10,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan positif penerimaan didorong oleh kinerja penerimaan cukai yang sejak awal tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan, serta program penertiban

impor, cukai dan ekspor berisiko tinggi (PICE-BT) yang terus digalakkan.

Kinerja penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang terdiri dari PPh Impor, PPN Impor dan PPNBM Impor, adalah sebesar Rp150,89 triliun. Sehingga total penerimaan yang berhasil dikumpulkan hingga akhir bulan Agustus 2019 oleh Bea Cukai adalah sebesar Rp269,89 triliun.

Penerimaan Bea Masuk (BM) hingga bulan Agustus 2019 tercatat sebesar Rp23,83 triliun. Capaian tersebut merupakan 61,25 persen dari target dan tumbuh negatif 5,19 persen dibandingkan capaian bulan Agustus 2018. Raihan penerimaan BM terhadap targetnya merupakan yang tertinggi dibandingkan kinerja komponen penerimaan lainnya. Kinerja penerimaan BM sendiri, sangat dipengaruhi oleh kinerja impor nasional yang sejak awal tahun mengalami perlambatan dibanding kinerja impor tahun lalu. Alhasil, perlambatan tersebut berdampak kepada capaian penerimaan BM yang terus tertekan.

Capaian penerimaan cukai per 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp93,12 triliun atau 56,27 persen dari target penerimaan cukai tahun 2019 yang sebesar Rp165,50 triliun. Penerimaan cukai berasal dari 3 komponen yaitu Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA). Kinerja positif penerimaan cukai sepanjang tahun ini dikontribusi terutama oleh penerimaan CHT yang tumbuh signifikan sejak awal tahun, diikuti oleh penerimaan cukai MMEA. Capaian penerimaan cukai sendiri adalah yang tertinggi dibandingkan dengan komponen penerimaan yang lain.

Penerimaan CHT hingga bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp88,97 triliun atau tumbuh sebesar 18,60 persen dibandingkan capaian tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan CHT sepanjang tahun 2019 merupakan yang tertinggi sejak 3 tahun terakhir.

Pertumbuhan positif CHT didorong oleh kebijakan relaksasi pelunasan pembayaran pita cukai, ditambah program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) yang semakin gencar dalam memerangi peredaran rokok ilegal.

Penerimaan cukai MMEA sampai dengan akhir bulan Agustus 2019 mencapai Rp4,02 triliun atau tumbuh 17,3 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2018. Kinerja positif penerimaan cukai MMEA salah satunya dikontribusikan oleh program PCBT, yang berperan dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal. Capaian cukai EA per 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp0,08 triliun atau 51,82 persen dari target yang diamanatkan pada APBN tahun 2019 yang sebesar Rp0,16 triliun.

Realisasi penerimaan Bea Keluar (BK) sampai dengan akhir bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp2,05 triliun, atau merupakan 46,30 persen dari target BK pada APBN tahun 2019 yang sebesar Rp4,42 triliun. Kinerja penerimaan BK mengalami pertumbuhan negatif 53,25 persen dibandingkan kinerja tahun lalu. Penerimaan BK dikontribusikan utamanya oleh ekspor komoditas tambang, terutama konsentrat tembaga. Alhasil kondisi realisasi ekspor tembaga yang mengalami perlambatan sebagai akibat perubahan kebijakan perusahaan tambang utama dalam proses eksplorasi pertambangannya, memberikan tekanan pada penerimaan BK.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Penerimaan Gas Bumi sebesar Rp17,2 triliun terealisasi di bulan Agustus 2019

Realisasi PNBPN s.d. 31 Agustus 2019 (dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)

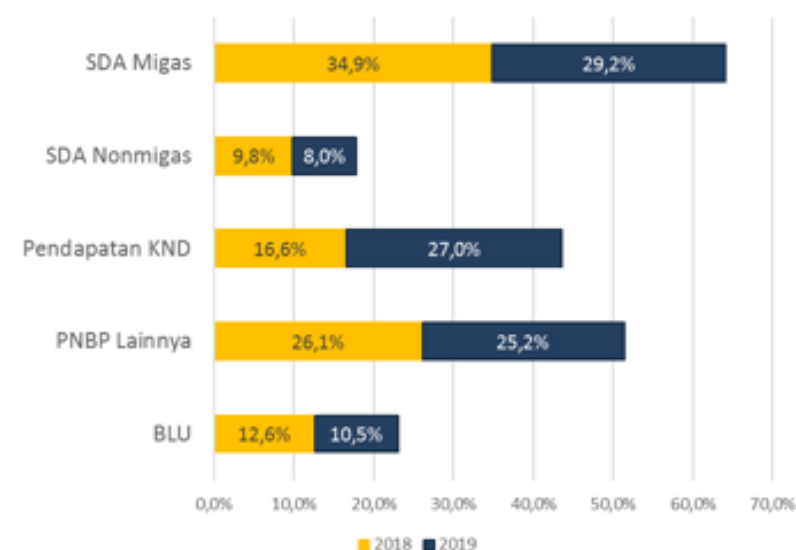
	2019	Realisasi		
	APBN	31 Agustus 2019	% thd APBN	Growth y-o-y (%)
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,86	268.163,80	70,89	11,59
A. Penerimaan SDA	190.754,77	99.830,63	52,33	(7,08)
1. Migas	159.778,31	78.365,56	49,05	(6,50)
a. Minyak Bumi	118.606,71	61.117,80	51,53	(27,08)
b. Gas Alam	41.171,60	17.247,76	41,89	4.063.075.499,22
2. Non Migas	30.976,46	21.465,07	69,29	(9,11)
B. Pendapatan dari KND	45.589,30	72.485,97	159,00	82,25
C. PNBPN Lainnya	94.069,33	67.689,30	71,96	7,78
D. Pendapatan BLU	47.884,45	28.157,90	58,80	(7,08)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode bulan Januari s.d Agustus 2019 mencapai Rp268,16 triliun, atau 70,89 persen dari target APBN tahun 2019. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 11,59 persen dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2018. Pencapaian realisasi tersebut merupakan kombinasi dari kontribusi pertumbuhan PNBPN Lainnya dan peningkatan signifikan Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), serta penurunan Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Komposisi PNBPN masih secara dominan berasal dari Penerimaan SDA dengan proporsi 37,2 persen dari total PNBPN untuk periode bulan Januari s.d Agustus tahun 2019 dan 44,7 persen pada periode yang sama di tahun 2018. Oleh karena itu, pergerakan asumsi dasar ekonomi makro yang mempengaruhi penerimaan SDA, seperti harga komoditas dan capaian lifting minyak dan gas bumi akan berdampak kepada realisasi PNBPN.

Sampai dengan bulan Agustus 2019, realisasi Penerimaan SDA mencapai 99,83 triliun atau 52,33 persen dari target APBN di tahun 2019. Realisasi

Kontribusi Terhadap PNBPN



tersebut turun 7,08 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp107,43 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh antara lain turunnya harga komoditas.

Rata-rata harga ICP yang membentuk realisasi PNBPN periode bulan Januari s.d Agustus 2019 adalah realisasi rata-rata ICP periode Des 2018-Juli 2019 yang mencapai USD61,87/barel atau turun 7,3 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD66,36/ barel. Sementara itu, lifting harian minyak rata-rata periode Des 2018-Juli 2019 sebesar 758,6 mbopd turun 3,6 persen dari

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 785,7 mbopd sedangkan lifting harian Gas Bumi Des 2018-Juli 2019 sebesar 1.070 MBOEPD lebih rendah 7,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.155 MBOEPD. Pelemahan rata-rata ICP dan penurunan capaian lifting migas tersebut tercermin dalam realisasi Penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang berjumlah Rp78,36 triliun pada periode bulan Januari s.d Agustus 2019 atau 49,05 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi ini turun 7,1 persen dari realisasi periode yang sama di tahun 2019 yang mencapai Rp83,82 triliun yang merupakan 104,32

persen dari target APBN tahun 2018. Namun demikian, realisasi penerimaan SDA Gas Bumi sudah dapat terealisasi pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp17,25 triliun.

Penurunan juga terjadi pada realisasi Penerimaan SDA Nonmigas dalam bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2019 sebesar 9,11 persen dari realisasi di tahun 2018. Dengan capaian sejumlah Rp21,46 triliun, realisasi ini merupakan 69,29 persen dari target APBN 2019. Penerimaan SDA Nonmigas meliputi penerimaan yang berasal dari pertambangan mineral dan batubara (Minerba) sejumlah Rp17,04 triliun, Kehutanan sebesar Rp3,06 triliun, Perikanan sejumlah Rp0,32 triliun, dan Pendapatan Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp1,03 triliun. Pergerakan harga komoditas akan berdampak kepada penerimaan dari Pertambangan Minerba yang pada akhirnya berimbas kepada Penerimaan SDA Nonmigas karena Pertambangan Minerba merupakan komponen dominan. Pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2019, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) periode Januari-Agustus 2019 mencapai USD83,95/ton lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (USD98,93/ton) diindikasikan menjadi salah satu penyebab penurunan realisasi penerimaan SDA Nonmigas.

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) masih memberikan kontribusi yang dominan pada realisasi PNBPN periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2019. Setoran sisa surplus BI pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 30,09 triliun dan realisasi pendapatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai dengan bulan Agustus 2019 yang mencapai Rp42,39 triliun menyumbang realisasi Pendapatan dari KND secara total Rp72,48 triliun atau 159,0 persen dari target APBN tahun 2019. Jumlah ini naik 82,3 persen dari realisasi Pendapatan KND di tahun 2018 yang sebesar Rp39,77 triliun. Adapun lima BUMN yang menyetorkan dividen terbesar untuk periode bulan Januari sampai dengan Agustus adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp9,25 triliun, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp8,45 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp6,75 triliun, PT Pertamina (Persero) sejumlah Rp4,5 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp2,25 triliun.

Realisasi PNBPN Lainnya mengalami peningkatan 7,8 persen jika dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2018. Pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2019, realisasi PNBPN Lainnya mencapai Rp67,69 triliun atau 72,0 persen dari target APBN tahun 2019. Namun demikian, persentase

peningkatan ini lebih rendah dari peningkatan di periode yang sama di tahun 2018 yang mencapai 8,8 persen. Komponen PNBPN Lainnya yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, antara lain Pendapatan penjualan hasil produksi nonlitbang, pendapatan jasa kesehatan, dan pendapatan jasa lainnya.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) untuk periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp28,16

triliun yang merupakan 58,8 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan 7,8 persen dari realisasi periode yang sama di tahun 2018 yang mencapai Rp30,30 triliun yang pada saat itu sudah mencapai 70,0 persen dari target APBN 2018. Salah satu penurunan komponen Pendapatan BLU terjadi pada pengelolaan dana khusus untuk masyarakat, yang pada bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2019 mencapai Rp3,4 triliun sementara pada periode yang sama di tahun 2018 mencapai Rp9,53 triliun..



Setor Penerimaan Negara, Semudah Beli Pulsa

Jumat, 23 Agustus 2019 akhirnya Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (**MPN G3**) diluncurkan oleh Menteri Keuangan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta. MPN G3 di desain untuk memenuhi tuntutan **perubahan cara menyetor** hanya dengan gawai (gadget) mengikuti perkembangan e-commerce & financial technology saat ini. Kemudahan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor (wp/wb/ws) memenuhi kewajibannya harus memenuhi prinsip: **adil, efisien, dan nyaman** sehingga dengan MPN G3 “**menyetor penerimaan negara**” menjadi lebih cepat, aman, dan mudah, “**semudah membeli pulsa**”.

MPN G3 merupakan amanah Peraturan Menteri Keuangan (**PMK No. 202/PMK.05/2018**) tentang Perubahan Kedua PMK No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik yang berlaku sejak 31 Desember 2018. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan (**DJPb**) bersama Ditjen Pajak (**DJP**), Ditjen Bea dan Cukai (**DJBC**), Ditjen Anggaran (**DJA**), dan collecting agent (agen penerimaan), yaitu: **Bank/Pos Persepsi, dan Lembaga**

Persepsi Lainnya (LPL) berkomitmen penuh untuk meningkatkan layanan penerimaan negara secara elektronik yang lebih handal melalui “MPN G3”.

Implementasi MPN G3 dilaksanakan secara bertahap pada 2019 di DJPb bersama biller dan collecting agent sejak: **Piloting I** (21 Juni), **Roll Out I** (4 Juli), **Roll Out II** (22 Juli), **Piloting II** (1 Agustus), **Roll Out III** (5 Agustus), **Piloting III** (8 Agustus), dan **Portal Single Sign-On (SSO)** Penerimaan Negara (20 Agustus). Selanjutnya, berdasarkan hasil piloting dan rollout tersebut, MPN G3 diluncurkan tanggal **23 Agustus 2019** yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Keuangan, Direksi Bank Himbara, 21 bank persepsi, Tokopedia, Bukalapak, Finnet, BPKD Prov. DKI Jakarta, dan Agen Laku Pandai.

Sesuai dengan tema “**APBN bisa Digital**”, selain MPN G3, Menteri Keuangan juga meresmikan berbagai inovasi digital lainnya, yaitu: **Agen Laku Pandai** melalui Mini ATM Electronic Data Capture (EDC), integrasi penyetoran **pajak belanja daerah melalui SP2D online, virtual account** bendahara pengeluaran, pembayaran **digital** dan **marketplace**



belanja uang persediaan dalam digitalisasi sistem pembayaran Pemerintah. Peluncuran MPN G3 juga menjadi momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-74 dengan semangat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara melalui **digitalisasi APBN**.

Hingga saat ini, MPN G3 menjadi salah satu sistem utama Kementerian Keuangan dalam pengelolaan APBN. Hal ini terbukti **lebih dari 92 persen** transaksi penerimaan Negara disetor melalui **MPN** sejak tahun 2017. Dari total penerimaan negara tahun 2018 sebesar Rp2.064,07 triliun, 92,26 persen atau senilai Rp1.904,40 triliun disetor melalui MPN, sedangkan 7,72 persen sisanya berasal dari potongan SPM dan setoran langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Selama tahun 2018, MPN telah memproses 94,92 juta transaksi penerimaan Negara dalam Rupiah (IDR) dan 173.934 transaksi penerimaan Negara dalam dollar Amerika Serikat (USD).

Secara kumulatif, hingga 31 Agustus 2019, MPN G3 telah

memproses setoran penerimaan negara sebanyak 61,92 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp1.241,51 triliun (90,50 persen) melalui 86 Bank/Pos Persepsi/LPL; sedangkan sisanya sebesar Rp115,53 triliun (9,5 persen), berupa: potongan SPM, dan setoran langsung ke RKUN. Dengan bergabungnya LPL, kanal juga bertambah menjadi **15 kanal**, yaitu: **Teller, ATM, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, EDC, Overbooking, EDC Laku Pandai, Mobile Laku Pandai, Internet Banking Pajak Belanja Pemda**, dan 5 kanal baru yang disediakan LPL, yaitu: **Dompot Elektronik (e-wallet), Transfer Bank, Virtual Account, Direct Debit**, dan **Kartu Kredit**.

MPN sebagai salah satu **backbone system APBN** di Kementerian Keuangan melewati perjalanan waktu panjang. Sejak **MPN G1** tahun **2006**, **MPN G2** tahun **2015**, dan kini **MPN G3** tahun **2019**. MPN G1 bertujuan untuk mengintegrasikan sistem penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan pembayaran dan pencatatan 3 jenis penerimaan negara, yaitu: Pajak, Bea Cukai dan PNB; sedangkan **MPN G2**, memodernisasi penyetoran penerimaan negara melalui **kode billing** dan pembagian antar unit yang memiliki kewenangan **penagihan/biller** (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dan **penerima uang/settlement**, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Selain itu, MPN G2 memiliki kanal penyetoran yang lebih banyak dibandingkan **MPN G1** yang hanya terbatas melalui **teller bank**, sedangkan pada **MPN G2** penyetoran dapat juga melalui: **ATM, internet banking, mobile banking**, dan **mesin EDC**. Dengan moto "**Praktis, Cepat, dan Aman**", MPN G2 telah merevolusi sistem penerimaan Negara sehingga memperoleh penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu dari 4 (empat) **Inovasi Layanan Publik Terbaik** pada tahun **2016**.

Sistem penerimaan Negara secara elektronik terus dikembangkan hingga "MPN G3" melalui 3 (tiga) inovasi, yaitu: **kapasitas, kanal**, dan **interface**. Kapasitas MPN G3 mampu melayani setoran penerimaan negara hingga **1.000 transaksi per detik** (semula hanya 60 transaksi per detik). Kanal juga bertambah melalui: **Dompot Elektronik, Transfer Bank, Virtual Account, Direct Debit**, dan **Kartu Kredit** yang dilaksanakan LPL sebagai agen penerimaan baru selain Bank/Pos Persepsi, seperti: e-commerce, fintech, dan lain-lain. Saat ini, LPL yang bekerjasama dengan

Pemerintah antara lain **Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet.**

Melalui **interface MPN G3**, setiap penyetor hanya mengakses **1 (satu) Portal Penerimaan Negara** secara **Single Sign-On (SSO)**, yaitu: <https://mpn.kemenkeu.go.id> untuk memperoleh **kode billing** berbagai jenis penerimaan (Pajak, Bea Cukai, PNBPN, dan lainnya), sekaligus dapat menyetor penerimaan Negara tersebut dalam portal yang sama. Portal SSO Penerimaan Negara tersebut merupakan opsi alternatif pembuatan **Kode Billing** yang telah ada selama ini, yaitu: **e-billing Pajak, CEISA Bea Cukai, dan Simponi PNBPN**, sekaligus juga perluasan kanal pembayaran. Saat ini, terdapat **3 (tiga) kanal** yang baru terhubung dengan Portal SSO Penerimaan Negara, yaitu: **BRI e-pay, Mandiri Microsite, dan BNI Mobile.**

Portal SSO Penerimaan Negara **bukan sistem yang berdiri sendiri.** Portal ini terhubung dengan sistem **billing** dari **biller** untuk penerbitan **kode billing** dan terkoneksi dengan sistem agen penerimaan sehingga dapat **menyetor** penerimaan Negara dalam **portal yang sama (tidak perlu berpindah portal)**. Selain itu, Portal SSO Penerimaan Negara merupakan wujud **sinergi** dan **kerja sama** antar unit lingkup Kementerian Keuangan sebagai **biller** dan **settlement** dalam sistem penerimaan negara secara elektronik.

Performa infrastruktur MPN G3 juga harus dapat diandalkan untuk menjamin kelancaran setiap transaksi penerimaan negara. Infrastruktur **MPN G2** yang dibangun tahun **2011** telah usang dari manfaat efektif yang diberikan. Kapasitas 60 transaksi per detik menjadi kurang memadai untuk memproses transaksi penerimaan negara yang semakin tinggi. Pada tahun **2015, MPN G2** memproses **9,3 juta transaksi** yang semakin meningkat signifikan pada tahun **2016** menjadi **54,3 juta transaksi.** Melalui implementasi penuh **MPN G2**, transaksi penerimaan negara terus meningkat secara konsisten menjadi **86,4 juta** transaksi pada tahun **2017** dan menjadi **94,9 juta** transaksi pada tahun **2018.**

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah transaksi penerimaan negara, infrastruktur terus diperbarui pada **perangkat keras, basis data, dan aplikasi.** Dengan pembaruan ini, kapasitas transaksi menjadi 1.000 transaksi per detik diharapkan mampu memproses data penerimaan Negara, terutama saat jatuh tempo, yaitu: setiap **pertengahan bulan** dan **akhir tahun.** Dengan infrastruktur MPN G3 yang lebih handal, diharapkan menjamin kelancaran penerimaan negara **masuk ke Kas Negara** sehingga dapat memenuhi kebutuhan **belanja** Pemerintah **setiap hari** melalui **APBN.**

Melalui pengembangan teknologi digital yang semakin berkembang dengan eksistensi perusahaan berbasis teknologi memungkinkan sistem penerimaan negara dapat memanfaatkan **inovasi digital.** Melalui kerjasama perusahaan berbasis teknologi digital tersebut, penerimaan negara dapat lebih menjangkau masyarakat luas dengan menghadirkan **cara penyetoran** yang lebih **mudah, kapanpun,** dan **dimanapun** karena dapat diakses melalui jaringan **internet** dengan menggunakan gawai.

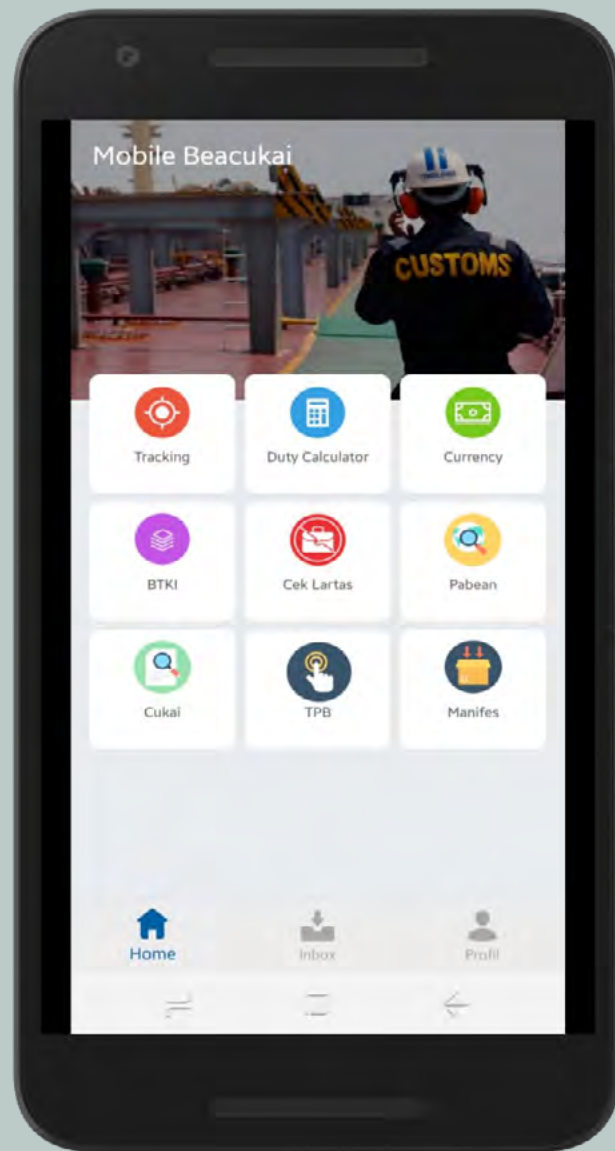
Sejak MPN G1 hingga MPN G2, Bank/Pos Persepsi telah lama melayani masyarakat (wp/wb/ws) menyetor penerimaan Negara. Kini, MPN G3 memperluas **agen penerimaan selain Bank/Pos Persepsi** untuk berpartisipasi menerima dan menatausahakan penerimaan Negara sehingga semakin banyak pilihan dan kemudahan bagi masyarakat untuk menyetor penerimaan negara. Lembaga ini dapat berupa perusahaan **e-commerce, financial technology, retailer,** dan perusahaan **berbasis teknologi** lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai LPL dalam sistem penerimaan Negara elektronik.

LPL adalah lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam sistem penerimaan negara

yang menggunakan surat setoran elektronik. LPL menawarkan cara baru menyetorkan penerimaan negara dari semula melalui **loket bank/pos persepsi** dan/atau **elektronik perbankan** menjadi dapat dilakukan memakai **gawai.** LPL tetap memanfaatkan kerja sama dengan perbankan, namun penyetorannya inklusif karena mengakomodasi nasabah berbagai bank melalui berbagai kanal.

Digitalisasi merupakan inovasi yang tidak dapat ditawar untuk memenuhi tuntutan **modernisasi** sistem penerimaan negara dalam pengelolaan pendapatan APBN. Upaya peningkatan **kolektibilitas penerimaan** Negara (**pajak, bea cukai, PNBPN,** dan penerimaan Negara lainnya) ditentukan seberapa taat **keajiban** negara tersebut dapat **dipenuhi.** Idealnya, penerimaan negara dapat diterima ketika kewajiban timbul. Dengan demikian, **modernisasi** sistem penerimaan negara harus bertujuan untuk meningkatkan **kolektibilitas** penerimaan Negara yang semakin **cepat, aman,** dan **mudah, “semudah membeli pulsa”.**

Layanan Bea Cukai Dalam Genggaman



Sejak tahun 1990, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi salah satu pionir instansi pemerintah yang mulai menerapkan teknologi informasi dalam penyediaan layanan kepada para pengguna jasanya. Saat itu, aplikasi komputer sederhana hanya digunakan sebagai sarana standardisasi dan pengumpulan data, juga mengubah proses pengajuan dokumen impor barang, yang dari sebelumnya berupa tulisan tangan di atas kertas menjadi data digital yang terekam di dalam komputer.

Seiring kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat, Bea Cukai konsisten berinovasi menyediakan jenis-jenis layanan kepabeanan dan cukai. Semua layanan yang disediakan Bea Cukai telah menerapkan teknologi informasi, terutama dalam bidang yang menjadi core business-nya seperti layanan impor umum (cargo), impor barang kiriman (e-commerce), impor ke kawasan berikat, impor di kawasan bebas (free trade zone), ekspor barang, cukai, hingga layanan pada kawasan perbatasan negara (pelintas batas). Seluruh jenis layanan Bea Cukai berbasis teknologi informasi tersebut terkumpul di

dalam sebuah basis pangkal aplikasi layanan yang bernama Customs and Excise Information System Automation (CEISA).

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dapat berakibat pada hilangnya eksistensi sebuah organisasi/bisnis jika tidak mampu melakukan adaptasi secara cepat. Fenomena tutupnya beberapa gerai bisnis retail raksasa akibat terjadinya 'shifting' gaya belanja masyarakat dari konvensional menjadi belanja daring menjadi bukti akan hal tersebut. Satu hal yang patut dicermati saat ini, kemajuan teknologi menjadikan masyarakat menjadi ingin lebih dimanjakan, dimana semua kegiatan ataupun transaksi bisnis sedapat mungkin dilakukan tanpa harus bergerak berpindah tempat. Lalu, apa yang saat ini dapat disediakan oleh teknologi informasi dalam menjawab tuntutan tersebut? Ya, aplikasi dalam perangkat genggam atau sering disebut sebagai aplikasi seluler (mobile application).

Sejak kemunculannya di tahun 2007, aplikasi seluler berbasis android menjadi sebuah fenomena baru yang digandrungi masyarakat secara luas. Penggunaan telepon selular pintar dengan penambahan fitur aplikasi seluler seakan menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam melakukan aktivitas kesehariannya, tidak terkecuali pada sektor bisnis, bahkan merambah hingga ke layanan instansi pemerintah. Mengamati fenomena tersebut, Bea Cukai pun tidak ingin tertinggal, sehingga pada

tahun 2017 diluncurkanlah pertama kalinya aplikasi seluler Bea Cukai yang dinamakan 'Mobile-BeaCukai' dengan beberapa fitur unggulan yang diharapkan dapat membantu pengguna jasa dalam melakukan transaksi kepabeanan dan cukai.

Hingga sekarang, aplikasi yang dirilis pada tanggal 13 September 2017 ini sudah mendapatkan 394 resensi dan nilai 4.2 dari penggunanya, dengan jumlah statistik pengguna yang mengunduh sebanyak lebih dari 50.000 perangkat. Pada awalnya, aplikasi tersebut diluncurkan untuk menjawab tuntutan pengguna jasa yang melakukan belanja daring melalui perusahaan penyedia platform lokapasar lintas negara seperti Lazada, Shopee, JDID, dan yang lainnya, yang ingin mengetahui sejauh mana status proses importasi barangnya. Menjawab hal tersebut, aplikasi Mobile-BeaCukai menyediakan dua fitur utama sebagai bentuk transparansi layanannya, yaitu fitur pelacakan (tracking) barang kiriman dan fitur kalkulator bea masuk dan pajak impor (duty-calculator).

Fitur pelacakan barang kiriman menyediakan informasi atas status pemrosesan dokumen impor berupa Consignment Note (CN) atas barang kiriman yang dipesan seorang yang melakukan belanja daring, setelah data CN tersebut diajukan secara elektronik oleh kurir pengiriman barang (Perusahaan Jasa Titipan) kepada sistem layanan teknologi informasi Bea Cukai. Pembelanja daring langsung dapat mengetahui urutan status kegiatan pemrosesan



lengkap dengan waktunya (hari, jam, dan detik dilakukannya layanan). Sementara itu, fitur kalkulator bea masuk dan pajak impor memberikan informasi nilai estimasi pengenaan bea masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) atas pembelian barang secara daring yang nilainya melebihi batas pembebasan atau deminimis yang sesuai peraturan saat ini, yakni senilai USD75 per penerima per harinya. Fitur duty-calculator juga dapat digunakan untuk menghitung estimasi pungutan bea masuk dan PDRI atas impor umum (cargo) dan impor barang penumpang.

Seiring mulai maraknya jumlah

pengguna aplikasi Mobile-BeaCukai, dan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan pengguna layanan, saat ini telah ditambahkan beberapa fitur lain yang dianggap paling dibutuhkan. Fitur pelacakan status importasi barang saat ini tidak hanya untuk layanan impor barang kiriman, tetapi juga diperluas untuk pelacakan status importasi barang umum (cargo), pelacakan status dokumen manifes, pelacakan status dokumen ekspor, pelacakan status dokumen impor ke kawasan berikat, hingga pelacakan status dokumen CK-5 dalam layanan cukai. Namun, untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap tersebut,

pengguna jasa harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pengguna layanan Portal Pengguna Jasa DJBC dan melakukan aktivasi sederhana.

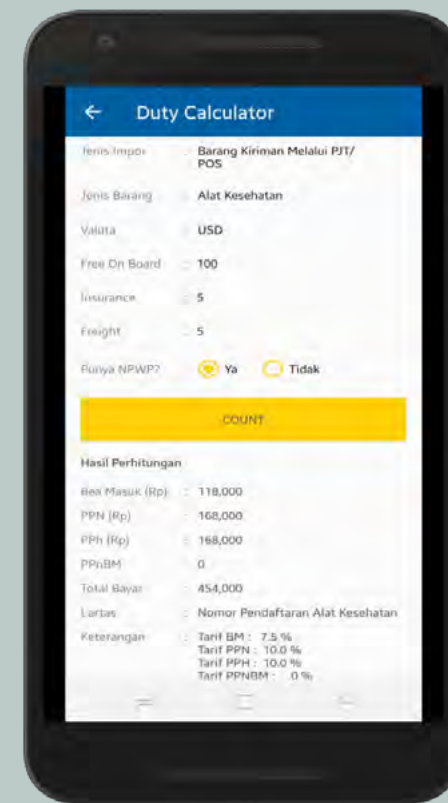
Secara lengkap, beberapa fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Mobile-BeaCukai adalah sebagai berikut:

1. Pelacakan Barang Kiriman (Tracking)

Fitur ini hanya membutuhkan input nomor resi/AWB (airway bill) yang valid, untuk menampilkan status pemrosesan dokumen pengajuan impor barang kiriman (e-commerce).

2. Kalkulator Bea Masuk (Duty-Calculator)

Merupakan simulasi atas estimasi perhitungan bea masuk dan pajak impor. Kalkulator ini telah disesuaikan dengan peraturan



terbaru terkait aturan barang kiriman.

3. Informasi Kurs Pajak Mingguan (Currency)

Menyediakan Informasi nilai kurs pajak mingguan terbaru, ataupun nilai kurs pajak di waktu yang telah lalu sesuai kebutuhan pengguna.

4. Pelacakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Manifes, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Cukai

Fitur pelacakan dokumen dapat

digunakan untuk dokumen impor, ekspor, manifest, TPB, dan Cukai (CK-5).

5. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI/HS Code)

Merupakan fasilitas pencarian kode HS, deksripsi serta uraian barang yang sudah terdaftar dalam BTKI.

6. Cek Lartas (Restriction Goods)

Pengecekan barang larangan dan pembatasan (lartas) dengan memasukan delapan digit HS Code untuk menampilkan jenis perizinan dari instansi terkait yang harus dipenuhi sebelum importasi dilakukan.

Fitur-fitur yang telah disediakan merupakan bentuk efisiensi dan transparansi layanan Bea Cukai kepada para pengguna jasanya, dan akan terus diperkaya sesuai kebutuhan para penggunanya.

Beberapa fitur yang direncanakan akan dikembangkan pada versi selanjutnya di antaranya fitur token pengaman pengajuan data kepabeanan oleh Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK) dan fitur push notification atas pengiriman dokumen persetujuan impor barang dan dokumen tambah bayar dalam layanan impor barang umum (cargo). Saat ini, aplikasi Mobile-BeaCukai hanya tersedia dalam platform android, namun direncanakan pada awal tahun 2020 juga tersedia dalam platform IOS.

Untuk menggunakan layanan Mobile-BeaCukai, dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasinya melalui aplikasi Google-Playstore dengan kata kunci pencarian "Mobile-BeaCukai". Melalui aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan para pengguna jasa dalam melakukan transaksi kepabeanan dan cukai kapanpun dan di manapun. Inovasi layanan berbasis teknologi informasi yang disediakan Bea Cukai ini juga salah satu wujud upaya menjadikan **Bea Cukai Makin Baik**.

SIMPONI dan MPN G3, Sinergi untuk Layanan yang Lebih Baik

Seper ti yang terlihat dari namanya, MPN G3 ini adalah penyempurnaan dari MPN generasi sebelumnya (MPN G2). Tentu dengan status penyempurnaan, MPN G3 mengusung berbagai kelebihan dan keunggulan dibanding pendahulunya. Tiga hal besar yang digadang-gadang bisa menjadi nilai tambah MPN G3 adalah pemutakhiran infrastruktur, sistem Single Sign-On (SSO), dan keberadaan Lembaga Persepsi Lainnya (LPL). Jadi seperti apa itu wujudnya?

Pemutakhiran infrastruktur dilakukan sebagai wujud peningkatan pelayanan. Dengan jumlah transaksi yang terus membeludak, lebih dari 600 transaction per second (tps), menuntut MPN menambah kecepatannya dari sebelumnya 60 tps menjadi 1000 tps. Selanjutnya, SSO diciptakan agar memudahkan wajib bayar/wajib pajak/wajib setor untuk membuat seluruh billing (PNBP, pajak, bea dan cukai, dan penerimaan lainnya) sekaligus melakukan

pembayaran dalam satu laman. Terakhir, kehadiran LPL membuat wajib bayar/wajib pajak/wajib setor memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih media pembayaran. Yang paling menarik adalah masuknya e-commerce dan fintech sebagai saluran pembayaran penerimaan negara. Tentu hal ini akan semakin memudahkan, mengingat e-commerce dan fintech sudah menjadi keseharian masyarakat masa kini.

Lantas SIMPONI itu apa? SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN Online) sebenarnya termasuk salah satu biller dalam MPN. Sebagaimana diketahui, di dalam MPN, termasuk MPN G3, terdapat tiga macam billing, yaitu billing PNBPN, pajak serta bea dan cukai. Nah, SIMPONI adalah billing generator untuk billing PNBPN. Jadi sederhananya, jika wajib bayar akan membayar PNBPN maka SIMPONI yang akan menerbitkan billingnya. Sejak awal dibuat, SIMPONI bisa diakses melalui laman www.simpONI.kemenkeu.go.id.

Di situ wajib bayar dapat memilih kewajiban PNBPN yang akan dibayar untuk dibuatkan billingnya. Namun seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan interkoneksi sistem informasi layanannya dengan SIMPONI. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pelayanan yang mereka berikan dengan menyederhanakan proses dari hulu hingga hilir. Dalam konsep tersebut, SIMPONI tetap berperan sebagai billing generator sedangkan sistem informasi layanan yang dimiliki K/L sebagai media bagi K/L dalam melengkapi kebutuhan data.

Hadirnya MPN G3 menambah angin segar bagi SIMPONI. Sebagai bagian dari “keluarga” MPN G3, SIMPONI juga akan dapat menikmati tiga keunggulan MPN G3 yang telah dijelaskan di atas. Dengan peran sebagai billing generator yang bisa bekerja di depan dan balik layar, SIMPONI sangat terbantu dengan

peningkatan infrastruktur pada MPN G3 yang meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksinya. Fakta ini jadi kabar baik bagi peningkatan kualitas pelayanan SIMPONI dari sisi kecepatan. Begitu juga SSO, layaknya interkoneksi dengan sistem informasi milik K/L, dengan adanya SSO, SIMPONI akan ikut andil sebagai billing generator PNBPN. Hal ini tentu akan semakin mempermudah proses pembayaran PNBPN. Puncaknya, kehadiran lembaga pembayaran lainnya di MPN G3 juga tentu akan membantu SIMPONI dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib bayar untuk membayar billing PNBPN yang dihasilkan SIMPONI.

Sejatinya, kehadiran MPN G3 dan SIMPONI adalah pendukung bagi terlaksananya segala proses bisnis yang ada. Tujuan besarnya tentu bukan sekedar penerapan teknologi tinggi dalam pengelolaan penerimaan negara, melainkan pencapaian target yang lebih besar yaitu optimalisasi penerimaan negara, khususnya PNBPN.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 31 Agustus 2019 ditopang dengan meningkatnya penyerapan belanja K/L.

Sampai dengan akhir Agustus tahun 2019, realisasi Belanja Negara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.388,3 triliun (56,4 persen dari pagu APBN 2019). Realisasi tersebut meningkat sebesar 6,51 persen (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp857,7 triliun (52,48 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) sebesar Rp530,6 triliun (64,18 persen dari pagu APBN).

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi BPP sampai dengan akhir Agustus 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,94 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh belanja K/L yang yang realisasinya mencapai 56,31 persen terhadap

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d Agustus 2019 (Yang dirinci: Belanja KL menurut jenis dan Belanja Non K/L)	2019		Realisasi	
	APBN	s.d. Agustus 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja Pemerintah Pusat				
Belanja K/L	855,45	481,69	56,31	9,05
Belanja Pegawai	224,41	166,35	74,13	11,64
Belanja Barang	344,64	173,68	50,39	6,23
Belanja Modal	189,34	63,00	33,27	-10,93
Bantuan Sosial	97,06	78,66	81,04	34,54
Belanja Non K/L	778,89	376,04	48,28	4,35
al. Pembayaran Bunga Utang	275,89	172,42	62,49	6,25
Subsidi	224,32	103,45	46,10	-2,06
Jumlah	1.634,34	857,73	52,48	6,94

pagunya atau meningkat 9,05 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan belanja K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp78,7 triliun (81,04 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 34,54 persen (yoy). Lebih tingginya realisasi belanja bantuan sosial tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah untuk senantiasa memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui program-program seperti PKH, PBI, dan BPNT.

Sementara itu, kinerja realisasi belanja Non K/L mengalami penurunan dari 59,36 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 48,28 persen terhadap pagu APBN tahun 2019 yang terutama disebabkan karena menurunnya kinerja realisasi belanja subsidi energi. Realisasi subsidi energi tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) perkembangan realisasi ICP dan nilai tukar; (2) volume konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg; serta (3) volume konsumsi listrik bersubsidi.

Secara nominal, realisasi BPP K/L sampai dengan 31 Agustus 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 9,05 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan realisasi BPP K/L terutama berasal dari realisasi belanja bantuan sosial yang tumbuh sebesar 34,54 persen (yoy), belanja pegawai sebesar 11,64 persen (yoy), serta belanja barang sebesar 6,23

persen (yoy). Pertumbuhan ketiga jenis belanja tersebut yang mendorong pertumbuhan konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Kinerja realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai 77,1 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 72,08 persen dari pagu APBN tahun 2018. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sejak awal tahun, yang antara lain direalisasikan melalui: (i) pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai 82,4 persen dari pagu, (ii) penyaluran untuk 12 bulan bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019 yang mencapai 99,3 persen dari alokasinya, (iii) realisasi bantuan pangan yang mencapai 52,3 persen dari pagu, dan (iv) realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi).

Sementara itu, realisasi belanja pegawai (khususnya belanja pegawai K/L) juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 65,51 persen dari pagu APBN 2018 meningkat menjadi 74,1 persen dari pagu APBN 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L seiring dengan capaian

pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L serta telah dicairkannya anggaran THR bagi aparatur negara pada akhir bulan Mei, dan gaji ke-13 pada bulan Juli.

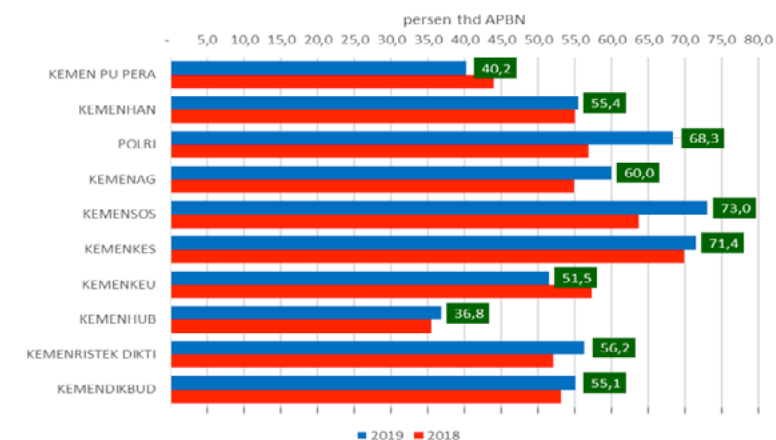
Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Agustus 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 48,2 persen terhadap APBN tahun 2018 menjadi 50,4 persen terhadap APBN tahun 2019. Proporsi realisasi belanja barang yang terbesar adalah untuk kegiatan peningkatan layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ristek Dikti. Selanjutnya, proporsi terbesar berikutnya yaitu untuk bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu berupa peningkatan kualitas atau pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh MBR yang dilaksanakan oleh Kementerian PU PERA.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai 33,3 persen dari pagu APBN 2019, atau sedikit

mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 34,7 persen dari pagu APBN tahun 2018. Perlambatan realisasi belanja modal tersebut, antara lain masih terdapatnya permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan, baik di Kementerian PU PERA maupun di Kementerian Perhubungan. Realisasi belanja modal tersebut utamanya digunakan untuk (1) pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan; rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan; termasuk prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Kementerian PU PERA dan Kementerian Perhubungan, dan (2) peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama, dan Basarnas.

A. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai Rp481,69 triliun atau 56,31 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi belanja K/L



Grafik Perkembangan Penyerapan Belanja 10 K/L terbesar (% realisasi)

Tabel Nilai belanja yang sudah dikontrakkan dan dilaporkan sampai dengan akhir Agustus 2019

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Nilai Kontrak
1	KEMEN PU PERA	110,73	73,53
2	KEMENHAN	108,36	37,41
3	POLRI	86,19	23,77
4	KEMENHUB	41,55	22,72
5	KEMENRISTEK DIKTI	41,26	4,87
6	KEMENKES	58,75	4,46
7	KEMENTAN	21,69	4,50
8	KEMENKUMHAM	13,31	3,98
9	KEMENKEU	45,16	2,75
10	KEMEN LHK	9,08	2,56
10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar		536,07	180,55
KL Lainnya		319,38	37,15
Total KL		855,45	217,70

Tabel beberapa output strategis K/L sampai dengan bulan Agustus 2019

	INDIKATOR	Realisasi s.d. Agustus
KEMENPUPERA	Pembangunan jalan baru (km)	113,65
	Pembangunan jalan tol (km)	5,57
	Pembangunan jembatan (m)	4.146,26
KEMENHUB	Pembangunan bandara	0
	Pembangunan rel KA (km 'sp)	141,7
BNN	Deteksi dini penyalahgunaan Narkoba di Instansi Pemerintah	
	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (berkas)	508
KEMDIKBUD	Berkas Perkara TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (berkas)	12
	Penyaluran KIP (siswa)	12,9 juta
KEMENAG	Penyaluran KIP (siswa)	1,2 juta
	Penyaluran BOS (siswa)	7,7 juta
KEMRISTEKDIKTI	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	18,1 ribu
	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	303.512
KEMENKES	Penyaluran JKN-KIS (jiwa)	96,7 juta
	Penyaluran PKH (KPM)	9,8 juta
KEMENSOS	Bantuan pangan	15,3 juta
	Peningkatan/Pengadaan/Penggantian Alutsista, a.l:	
KEMENHAN	Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut	12
	MKK (unit)	7.856
POLRI	Progres pengadaan	
	Almatsus (unit)	31.805
	Rumdin personil (unit/kk)	22.546

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 44,4 persen. Realisasi belanja K/L tersebut didominasi oleh 15 K/L terbesar (84,7 persen dari total belanja K/L), utamanya Kementerian Sosial yang telah merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, beberapa kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, dan penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan bantuan premi PBI JKN.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan, nilai kontrak yang telah dilakukan K/L sampai dengan bulan Agustus 2019 mencapai Rp217,7 triliun. Empat nilai dari jumlah kontrak tersebut sebagian besar dilakukan oleh 4 K/L, yaitu Kementerian PU PERA, Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, dan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, beberapa output strategis K/L sampai dengan bulan Agustus 2019 menunjukkan capaian yang positif diantaranya penyaluran PKH dan bantuan pangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus memperlihatkan adanya progres seperti pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, dan pembangunan jembatan serta pembangunan rel kereta api.

B. REALISASI BELANJA NONK/L TAHUN 2019

Realisasi belanja non K/L sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai Rp376,0 triliun, lebih tinggi secara nominal dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai Rp360,4triliun. Namun demikian, secara persentase belanja non K/L mengalami penurunan dari 59,36 persen terhadap APBN 2018 menjadi 48,28 persen terhadap APBN 2019. Penurunan realisasi belanja non K/L terutama disebabkan menurunnya pembayaran bunga utang dan belanja subsidi.

Realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 31 Agustus 2019 sebesar 62,49 persen terhadap APBN 2019, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 68,01 persen terhadap APBN 2018. Hal tersebut dikarenakan kondisi yield SBN yang cenderung menurun di awal tahun 2019 dibandingkan kondisi pada awal tahun 2018 sehingga biaya diskon cenderung lebih rendah. Selain itu, secara umum variasi komposisi penerbitan dan perbedaan jadwal pembayaran kupon SBN seri benchmark juga menyebabkan pembayaran bunga utang bersifat dinamis.

Belanja subsidi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga terjangkau, antara lain LPG tabung 3 Kg, BBM jenis minyak solar dan minyak tanah, tarif listrik, dan pupuk. Namun demikian,

Tabel realisasi belanja non K/L sampai dengan Agustus 2019

Belanja NonK/L	2019			% Growth APBN
	APBN	s.d Agustus 2019	% thd APBN	
1. Belanja Pegawai	157,15	98,24	62,51	8,33
2. Pembayaran Bunga Utang	275,89	172,42	62,49	6,25
3. Subsidi	224,32	103,45	46,10	-2,06

Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran. Dalam APBN 2019, belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp224,3 triliun. Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai Rp103,4 triliun atau 46,1 persen dari pagu APBN tahun 2019. Subsidi energi merupakan faktor penyumbang terbesar terhadap realisasi subsidi secara keseluruhan hingga akhir Agustus 2019 yang mencapai Rp75,4 triliun. Realisasi

subsidi energi tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) perkembangan realisasi ICP dan nilai tukar; (2) volume konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg; (3) volume konsumsi listrik bersubsidi; serta (4) pembayaran kurang bayar subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp10,0 triliun. Adapun untuk realisasi subsidi non energi hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp28,0 triliun, terutama dipengaruhi oleh realisasi subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan subsidi PPh DTP.

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

Dana Kelurahan

Dalam APBN 2019, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan



Total Dana

Rp 3.000 miliar



Jumlah Kelurahan

8.212 kelurahan (di 410 Kab/Kota)

Tujuan

membangun sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan



Kelurahan Paling Greget

● Belanja Negara

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Bantu Pendanaan Kelurahan, DAU Tambahan TA 2019 telah tersalurkan 87 persen lebih.

Sampai dengan 31 Agustus 2019, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah tersalurkan sebesar Rp530,61 triliun atau 64,18 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,84 persen (yoy).

A. DANA PERIMBANGAN

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per akhir Agustus 2019 adalah sebesar Rp63,08 triliun atau 59,31 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 37,87 persen (yoy). Capaian tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penyaluran sebagian Kurang Bayar (KB) DBH berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.07/2019 sebesar Rp2,72 triliun yang dilakukan pada bulan Mei dan Juli.

Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan akhir Agustus 2019 telah disalurkan sebesar Rp313,32 triliun atau 74,98 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 4,17 persen (yoy). Dari total tersebut, Rp2,61 triliun diantaranya adalah realisasi penyaluran DAU Tambahan (pagu Rp3,00 triliun).

Ada beberapa hal yang turut mempengaruhi realisasi DAU tersebut, yaitu : (i) penundaan penyaluran DAU reguler terhadap 30 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebesar Rp334,23 miliar; (ii) penundaan penyaluran DAU reguler terhadap 22 Pemerintahan Daerah yang tidak memenuhi komitmen Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen sebesar Rp75,43 miliar; (iii) penyelesaian kewajiban

tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh 3 Pemerintah Daerah sebesar Rp12,41 miliar; dan (iv) penyelesaian kewajiban Daerah Otonom Baru (DOB) pada 3 Pemerintah Daerah sebesar Rp6,50 miliar.

Realisasi penyaluran DAU Tambahan sebesar Rp2,61 triliun atau 87,06 persen dari pagu alokasi merupakan gabungan penyaluran Tahap I kepada 403 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,46 triliun (98,29 persen dari pagu tahap I) dan Tahap II kepada 324 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,15 triliun (79,02 persen dari pagu tahap II).

Sampai dengan akhir Agustus 2019, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah disalurkan sebesar Rp17,76 triliun atau 25,62 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut tumbuh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan daftar kontrak kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, Outlook penyaluran DAK Fisik diperkirakan mencapai Rp64,61 triliun atau 93,20



persen dari pagu alokasi. Hal ini dikarenakan terdapat potensi lebih salur akibat kontrak tahap satu dan dua masih didasarkan pada pagu alokasi, bukan pada kontrak kegiatan.

Upaya meningkatkan *governance* pengelolaan DAK Fisik dilakukan dengan menerbitkan PMK Nomor 121/PMK.07/2018. Salah satu yang diatur dalam PMK ini adalah terkait peran Inspektorat Daerah dalam mereviu dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik sebagai salah

satu syarat penyaluran DAK Fisik.

Penyaluran DAK Nonfisik sampai dengan 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp80,46 triliun atau 61,40 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,81 persen (*yoy*). Kepatuhan daerah yang semakin meningkat dalam menyampaikan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) menjadi salah satu faktor penyebab capaian positif tersebut. Faktor lain yang



mempengaruhi perbaikan tersebut adalah koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait untuk bersama-sama mendorong penyerapan di daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan kegiatan lainnya.

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Realisasi penyaluran DID hingga 31 Agustus 2019 adalah sebanyak Rp6,53 triliun atau 65,28 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 21,68 persen

(*yoy*).

Dari total 336 Pemerintah Daerah yang telah menerima penyaluran DID Tahap I, 13 diantaranya adalah Pemerintah Daerah penerima DID yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk penyaluran DID Tahap II, sudah ada 48 Pemerintah Daerah yang telah menerima penyaluran dengan total nominal sebesar Rp805,05 miliar. DID tahap II disalurkan paling cepat

Realisasi output strategis melalui TKDD DAK Fisik



bulan Juli sebesar 50 persen setelah memenuhi persyaratan berupa laporan realisasi penyerapan dana Tahap I yang menunjukkan penyerapan minimal 70 persen, yang diserahkan paling lambat bulan Agustus.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

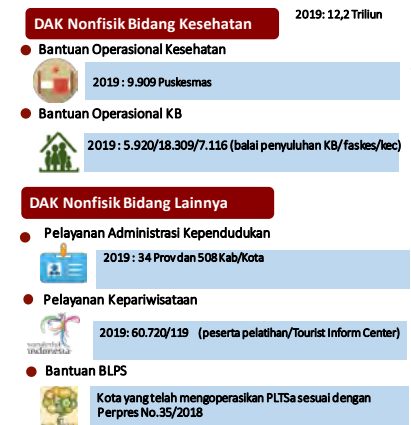
Dana Otonomi Khusus (Otsus) per 31 Agustus 2019 telah disalurkan sebesar Rp6,29 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan ketiga provinsi penerima Dana Otsus belum menyampaikan dan melengkapi persyaratan Penyaluran Dana Otsus Tahap II sesuai dengan PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Otsus Tahap II, Kementerian Keuangan

bersama Kementerian Dalam Negeri akan terus mendorong daerah untuk segera menyampaikan dan melengkapi persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap II.

Di sisi lain, Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai akhir Agustus 2019 telah disalurkan sebesar Rp0,96 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 20 persen (yoy).

D. DANA DESA

Realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD per 31 Agustus 2019 telah mencapai Rp42,20 triliun atau 60,29 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 16,43 persen (yoy). Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh koordinasi dan sosialisasi yang terus dilakukan selama ini.



Realisasi output strategis melalui TKDD DAK Non-Fisik

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Agustus 2019

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018			2019		
	Alokasi	Realisasi	% thd APBN	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.162,58	501.318,09	65,43	826.772,53	530.608,54	64,18
Transfer ke Daerah	706.162,58	465.072,12	65,86	756.772,53	488.407,04	64,54
A. Dana Perimbangan	676.602,99	450.359,48	66,56	724.592,59	474.624,61	65,50
1. Dana Transfer Umum	490.714,92	346.532,11	70,62	524.223,75	376.397,76	71,80
a. Dana Bagi Hasil	89.225,34	45.752,63	51,28	106.350,16	63.079,67	59,31
b. Dana Alokasi Umum	401.489,58	300.779,48	74,92	417.873,58	313.318,09	74,98
2. Dana Transfer Khusus	185.888,07	103.827,38	55,85	200.368,84	98.226,85	49,02
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	28.495,86	45,64	69.326,70	17.762,29	25,62
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.451,81	75.331,51	61,02	131.042,14	80.464,56	61,40
B. Dana Insentif Daerah	8.500,00	5.365,38	63,12	10.000,00	6.528,44	65,28
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.059,58	9.347,26	44,38	22.179,94	7.253,98	32,71
1. Dana Otsus	20.059,58	8.547,26	42,61	20.979,94	6.293,98	30,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.029,79	4.938,32	61,50	8.357,47	2.507,24	30,00
b. Provinsi Aceh	8.029,79	2.408,94	30,00	8.357,47	2.507,24	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.000,00	1.200,00	30,00	4.265,00	1.279,50	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.000,00	800,00	80,00	1.200,00	960,00	80,00
Dana Desa	60.000,00	36.245,97	60,41	70.000,00	42.201,50	60,29



PEMBIAYAAN UTANG

Pengelolaan pembiayaan yang prudent dan terukur untuk mendanai belanja yang produktif, mendukung kebijakan fiskal yang countercyclical ditengah ketidakpastian global

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp284,78 triliun atau 79,3 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp290,74 triliun atau 74,7 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp5,97 triliun atau 20,1 persen target APBN. Realisasi Pinjaman yang mencapai angka negatif disebabkan oleh realisasi pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang lebih besar dari pada penarikan Pinjaman Luar Negeri, namun sebaliknya, untuk Pinjaman Dalam Negeri penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok. Hingga akhir Juli 2019 Pemerintah telah membayarkan cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,58 triliun atau 39,3 persen dari target APBN sementara cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri telah dibayarkan sebesar Rp49,29 triliun atau 54,5 persen target APBN. Sementara itu, Penarikan Pinjaman Dalam Negeri mencapai Rp1,0 triliun atau 51,1 persen target APBN dan penarikan Pinjaman Luar

Negeri mencapai Rp42,90 triliun atau 71,2 persen target APBN.

Realisasi pembiayaan utang yang telah mencapai Rp284,78 triliun hingga akhir Agustus 2019 sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan belanja produktif di sektor prioritas yang mendesak, seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ditengah terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah serta didorong oleh kebutuhan belanja produktif yang tidak bisa ditunda, utang menjadi alat Pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Infrastruktur dari pinjaman bisa kita temukan di antaranya di Padang Bypass; Waduk Jatigede Sumedang; Rumah Sakit UNS Solo; Jalu Jalan Lintas Selatan (Giriwoyo - Duwet); dan lain sebagainya. Sementara itu, SBSN Proyek telah berkontribusi dalam membiayai pembangunan jalan dan jembatan di 30 provinsi; jalur KA di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; asrama haji di 24 kota/kabupaten; 701 kantor urusan agama dan manasik haji; gedung perkuliahan di 54 perguruan

PEMBIAYAAN UTANG

SEPTEMBER 2019

REALISASI PEMBIAYAAN UTANG hingga akhir Agustus 2019

Mencapai: **Rp284,78 triliun**

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

79,3 %

Realisasi Pembiayaan Utang Agustus 2019
Rp284.778,0



APBN Target APBN 2019
Rp359.250,6

■ APBN ■ Realisasi Pembiayaan Utang

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp284,78 triliun atau 79,3 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp290,74 triliun atau 74,7 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp5,97 triliun atau 20,1 persen target APBN.

Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman (Neto) Agustus 2019
Rp(5.966,4)



Surat Berharga Negara (Neto) Agustus 2019
Rp290.744,5

Realisasi Pinjaman yang mencapai angka negatif disebabkan oleh realisasi pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang lebih besar dari pada penarikan Pinjaman Luar Negeri, namun sebaliknya, untuk Pinjaman Dalam Negeri penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok.

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
Rp1.000,7
APBN
Rp1.956,4
51,1%

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN
Rp(578,8)
APBN
Rp(1.473,9)
39,3%

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
Rp42.899,0
APBN
Rp60.280,5
71,2%

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
Rp(49.287,3)
APBN
Rp(90.470,2)
54,5%



Infrastruktur dari pinjaman bisa kita temukan di antaranya di Padang Bypass; Waduk Jatigede Sumedang; Rumah Sakit UNS Solo; Jalu Jalan Lintas Selatan (Giriwoyo - Duwet); dan lain sebagainya.

Sementara itu, SBSN Proyek telah berkontribusi dalam membiayai:

Gedung perkuliahan di 54 perguruan tinggi Keagamaan Islam; 32 madrasah;

Jalur KA di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi

Pembangunan jalan dan jembatan di 30 provinsi;

Asrama haji di 24 kota/kabupaten; 701 kantor urusan agama dan manasik haji;

3 taman nasional;

Dan 328 pengelolaan sumber daya air.



Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengembangkan alternatif pembiayaan kreatif dan inovatif di luar porsi APBN untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, di antaranya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), platform Sustainable Development Goal (SDG) Indonesia One, dan Blended Financing.

tinggi Keagamaan Islam; 32 madrasah; dan 328 pengelolaan sumber daya air; serta 3 taman nasional.

Pemerintah mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif yang diwujudkan dengan pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional. Dari sisi pembiayaan berbasis syariah, Pemerintah juga terus mengembangkan berbagai terobosan seperti penerbitan Project Financing Sukuk dan Green Global Sukuk.

Namun Pemerintah juga berkomitmen untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), efisien, dan terukur (akuntabel) dalam mengelola utang, yang digambarkan pada strategi jangka menengah dan tahunan untuk mendukung pengadaan Pembiayaan dengan biaya minimal dan risiko yang terkendali. Strategi tersebut tercermin dalam portofolio utang pemerintah yang selalu mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri dan menggunakan pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan pendalaman pasar domestik dengan mengoptimalkan penerbitan SBN secara dalam jaringan (online).

Hingga akhir Agustus 2019, Pemerintah telah menerbitkan SBN ritel secara online sebanyak 7 (tujuh) kali, yang terdiri dari: SBR005; ST003; SR011; SBR006; ST004; SBR007; dan

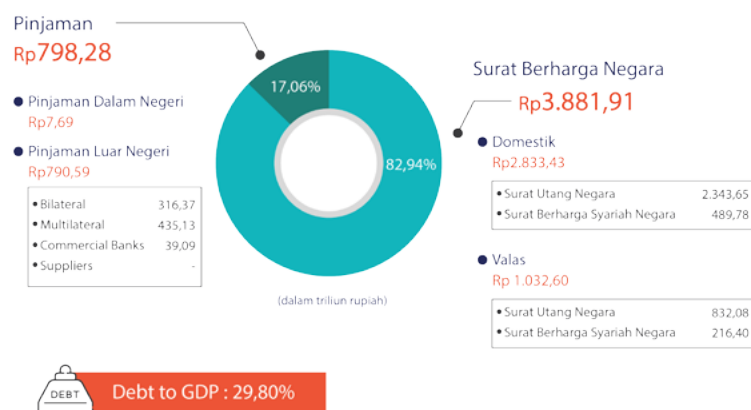
ST006. Penerbitan tersebut dilakukan secara bergantian setiap bulan kecuali bulan Juni yang bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri, dan berulang kali mencatatkan keberhasilannya dengan hasil penjualan melebihi target indikatif serta dapat mencapai tingkat keretelan yang semakin baik. Capaian tak lepas dari upaya Pemerintah dalam melakukan financial inclusion dan financial literacy untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi milenial akan pentingnya investasi.

Pengelolaan utang Pemerintah telah diatur di dalam UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. UU Keuangan Negara telah membatasi defisit APBN sebesar 3 persen dari rasio PDB serta batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB, sementara dalam UU APBN yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dengan DPR, telah ditetapkan besarnya estimasi pengadaan pembiayaan dan besaran anggaran untuk melunasi utang negara. Adanya payung hukum tersebut semakin membuktikan bahwa pengelolaan utang Pemerintah senantiasa dilakukan secara hati-hati dalam batas aman.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengembangkan alternatif pembiayaan kreatif dan inovatif di luar porsi APBN untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, di antaranya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), platform Sustainable Development Goal (SDG) Indonesia One, dan Blended Financing

RASIO UTANG PER PDB MENGALAMI TREN MENURUN SEJALAN PENGELOLAAN UTANG YANG PRUDEN DAN AKUNTABEL.

Posisi Utang Per Agustus 2019
Rp4.680,19 triliun



Posisi utang Pemerintah per akhir Agustus 2019 berada di angka Rp4.680,19 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,80 persen.

Untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang masih belum menemui titik terang, Pemerintah masih menerapkan kebijakan countercyclical dengan menggunakan APBN 2019 sebagai alat stimulus fiskal. Hal ini memungkinkan belanja negara lebih besar dari pada pendapatan, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya dengan utang.

Sepanjang tahun 2019, rasio utang Pemerintah terhadap PDB terus mengalami penurunan sejalan dengan pengelolaan utang yang prudent dan akuntabel dalam mendukung APBN yang semakin kredibel. Pemerintah secara konsisten mengelola utang dalam batas aman dan wajar, yang ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 1,23 persen yang masih jauh berada di bawah batas aman 3 persen serta realisasi rasio posisi utang sebesar 29,80 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia secara agregat mampu menutup lebih dari 3 kali jumlah posisi utang Pemerintah.

Dalam penatalaksanaan pinjaman, selama bulan Agustus 2019, Pemerintah telah menandatangani sebanyak 25 perjanjian pinjaman, yang terdiri atas perjanjian realisasi pinjaman dalam negeri dengan PT Bank Mandiri (persero) Tbk. 23 perjanjian yang ditandatangani pada 13 Agustus 2019. Selain itu, Pemerintah juga melakukan amandemen perjanjian pinjaman sebanyak empat kali, yang terdiri dari dua perjanjian pinjaman bilateral, satu perjanjian pinjaman multilateral, dan satu perjanjian pinjaman KSA/LPKE. Salah satu perjanjian pinjaman bilateral yang diamandemen adalah perjanjian dengan JICA untuk kegiatan "Patimbangan Port Development Project" senilai JPY118,94 miliar, dengan poin amandemen terkait Eligible Nationality untuk paket 3 sehingga dapat diikuti oleh peserta lelang dari Indonesia, dimana sebelumnya hanya dapat diikuti oleh peserta lelang yang berasal dari Jepang. Pada bulan Agustus 2019 juga terdapat tiga perjanjian pinjaman dengan masa berlaku yang telah selesai dan dilakukan penutupan, yaitu perjanjian bilateral dengan JICA untuk kegiatan "Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project" dan "Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (1)", serta perjanjian multilateral dengan ADB untuk kegiatan "Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative".

Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pendalaman pasar domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman

berv valuta asing yang dilaksanakan salah satunya melalui penerbitan secara teratur SBN seri ritel secara bergantian sepanjang tahun 2019. Filosofi di balik penerbitan SBN ritel adalah melibatkan seluruh warga negara dalam pembangunan Indonesia serta menumbuhkan "sense of ownership" segala tingkatan masyarakat terhadap pembangunan serta pengelolaan negara.

Terkait dengan Surat Berharga Negara, pada bulan Agustus 2019, Pemerintah kembali menerbitkan sukuk tabungan (ST), kali ini dengan seri ST005. ST005 merupakan SBN Ritel online ketujuh yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2019 setelah enam seri sebelumnya, yaitu SBR005; ST003; SR011; SBR006; ST004; dan SBR007. Capaian penjualan ST005 mencapai Rp1,96 triliun, berhasil melebihi target indikatif sebesar Rp1,71 triliun meskipun dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari penerbitan seri sebelumnya, yaitu berada di tingkat imbalan 7,40 p.a. floating with floor. Selain itu, ST005 berhasil mencatatkan rata-rata volume pemesanan sebesar Rp196 juta, yang mampu mencapai tingkat keritelan terbaik sepanjang penerbitan SBN Ritel, baik secara offline maupun online.

Penerbitan ST kali ini berhasil mencapai sebanyak 10.029 orang investor, yang masih didominasi oleh investor milenial sebanyak 5.393 investor atau 53,77 persen dari total investor. Hasil penjualan ST005 juga mencatatkan tambahan investor baru sebanyak 4.589 investor, dan 409 investor yang kembali membeli ST sejak Pemerintah menerbitkan ST secara online. Capaian tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial cukup melek investasi dan memiliki kesadaran tinggi untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Selanjutnya, Pemerintah akan kembali membuka penawaran SBN Ritel Online untuk bulan September 2019 dengan seri SBR008 yang ditawarkan pada tanggal 5 sampai dengan 19 September 2019. Meskipun tingkat kupon kembali menurun, yaitu 7,20 persen, namun Pemerintah tetap optimis bahwa penerbitan ini akan kembali melampaui target indikatif.

Realisasi APBN s.d. 31 Agustus 2018 dan 2019

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	2018			2019		
	APBN	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.894,72	1.152,88	60,85	2.165,11	1.189,28	54,93
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893,52	1.147,85	60,62	2.164,68	1.188,32	54,90
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618,10	907,53	56,09	1.786,38	920,15	51,51
a. Pajak Dalam Negeri	1.579,40	878,03	55,59	1.743,06	894,28	51,31
b. Pajak Perdagangan Internasional	38,70	29,51	76,25	43,32	25,87	59,72
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275,43	240,32	87,25	378,30	268,16	70,89
II. HIBAH	1,20	5,03	420,07	0,44	0,96	220,65
B. BELANJA NEGARA	2.220,66	1.303,41	35,10%	2.461,11	1.388,33	56,41
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454,49	802,10	55,15	1.634,34	857,73	52,48
1. Belanja K/L	847,44	441,72	52,12	855,45	481,69	56,31
2. Belanja Non /L	607,06	360,38	59,36	778,89	376,04	48,28
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,16	501,32	65,43	826,77	530,61	64,18
1. Transfer ke Daerah	706,16	465,07	65,86	756,77	488,41	64,54
2. Dana Desa	60,00	36,25	60,41	70,00	42,20	60,29
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(87,33)	11,74	(13,44)	(20,11)	(26,64)	132,43
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325,94)	(150,54)		(296,00)	(199,06)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(1,02)		(1,84)	(1,24)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,94	267,48	82,07	296,00	280,32	94,70
al. PEMBIAYAAN UTANG	399,22	276,20	69,18	359,25	284,78	79,27
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN		116,95			81,26	

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

